

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)
DI KABUPATEN MANOKWARI**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Magister Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

AGUNG KURNIAWAN

NIM. 500673575

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT

Sanitation and drinking water supplies the community-based is one of the program implemented by government to help the developed of public awarness in of drinking water supplies and overcome sanitation problems. In efforts to fullfilment of drinking water, the government district of Manokwari has programe assitance of drinking water and sanitation (PAMSIMAS) to build infrastructure of drinking water and sanitation supplies for the village of which access to the clean water value is still low, especially in a region that has not affordable by PDAM service. In this research the informants is something very important in effort to collect data and to find information what actually happened in PAMSIMAS the district of Manokwari. From the data in be through to the informant, so the conclusion can be drawn on the implementation of pamsimas the district of Manokwari. This research attempts to evaluate the success of services and clean water management performance community based through the PAMSIMAS programe. In the implementation of PAMSIMAS the district of Manokwari that found various problems. Especially most heavily is make the town society can do rearing and care facilities which has been built by PAMSIMAS continuously. The result of research is expected to be prized reference in an effort to make changes and repairs for PAMSIMAS the district of Manokwari and also for regional district of Manokwari involved in the PAMSIMAS programe.

Keywords: *evaluation, progam, community, water, and sanitation*

ABSTRAK

Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan salah satu Program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air minum serta mengatasi masalah sanitasi. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum, Pemerintah Kabupaten Manokwari mendapatkan bantuan Program Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) untuk membangun prasarana penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat perkampungan yang akses air bersihnya di nilai masih rendah, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan PDAM. Dalam penelitian ini para informan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya mengumpulkan data dan mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi didalam penyelenggaraan Pamsimas Kabupaten Manokwari. Dari data – data yang di dapat melalui informan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan tentang penyelenggaraan Pamsimas Kabupaten Manokwari. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi keberhasilan pelayanan dan kinerja pengelolaan air bersih berbasis masyarakat melalui Program PAMSIMAS. Dalam penyelenggaraan Pamsimas di Kabupaten Manokwari ditemukan berbagai persoalan, terutama yang paling berat adalah membuat masyarakat kampung untuk dapat melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang telah dibangun oleh Pamsimas secara berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi berharga dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan bagi Pamsimas Kabupaten Manokwari dan juga bagi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari yang terlibat dalam penyelenggaraan program Pamsimas.

Kata kunci: *evaluasi, progam, masyarakat, air, dan sanitasi*

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Manokwari

Penyusun TAPM : Agung Kurniawan

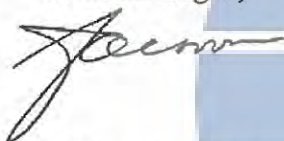
NIM : 500673575

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juli 2018

Menyetujui:

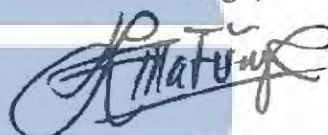
Pembimbing II,



Dr. Tuswoyo, M.Si

NIP. 19620808 198910 1 001

Pembimbing I,



Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd, MAP

NIDN. 1416077401

Penguji Ahli

Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.

NIP. 19540322 197801 1 001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik

Dekan FHISIP

Dr. Darmanto, M.Ed.

NIP. 19591027 198603 1 003

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.

NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Agung Kurniawan
 NIM : 500673575
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
 Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten
 Manokwari

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juli 2018

Waktu : 12.30 – 14.00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed.

Penguji Ahli

Nama : Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.

Pembimbing I

Nama : Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd, MAP



Pembimbing II

Nama : Dr. Tuswoyo, M.Si



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT maka peneliti dapat menyelesaikan TAPM ini tepat waktu, peneliti sangat menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, maka masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak dibutuhkan untuk penyempurnaan, dan peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Program Pamsimas Kabupaten Manokwari untuk menjadi referensi perubahan ke arah yang lebih baik, dan juga peneliti mempersilakan kepada para peneliti berikutnya yang tertarik terhadap topik ini untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan bagi penelitian mereka.

Melalui kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terimakasih kepada istri, anak, orang tua, keluarga besar serta pimpinan, rekan-rekan kerja, dosen pembimbing I, II, para tutor serta seluruh pegawai UT Pusat dan Upbjj UT-Sorong yang telah memberikan dukungan selama peneliti melakukan perkuliahan awal sampai dengan selesainya penelitian ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas semua dukungan ini.

Manokwari, 21 Mei 2018

Peneliti

RIWAYAT HIDUP

Nama : Agung Kurniawan

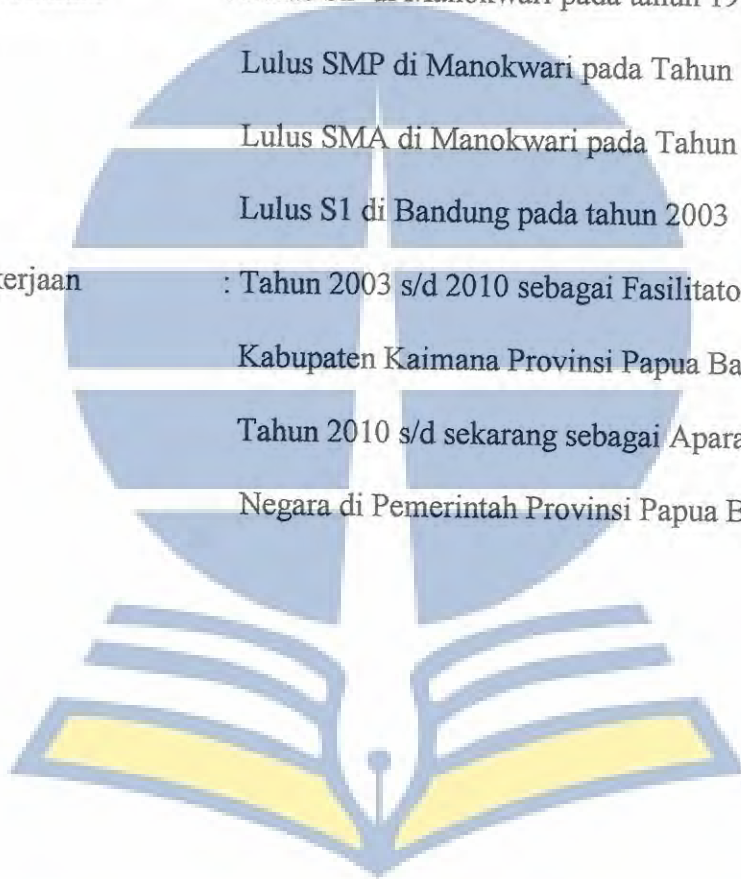
NIM : 500673575

Program Studi : Magister Administrasi Publik *Online*

Tempat / Tanggal Lahir : Singkawang / 22 Oktober 1980

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Manokwari pada tahun 1992
Lulus SMP di Manokwari pada Tahun 1995
Lulus SMA di Manokwari pada Tahun 1998
Lulus S1 di Bandung pada tahun 2003

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2003 s/d 2010 sebagai Fasilitator PNPM di
Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat
Tahun 2010 s/d sekarang sebagai Aparatur Sipil
Negara di Pemerintah Provinsi Papua Barat



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	57
C. Kerangka Berpikir	61
D. Operasionalisasi Konsep	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	64
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	64
C. Instrumen Penelitian	66
D. Prosedur Pengumpulan Data	66
E. Metode Analisis Data	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71

B. Evaluasi Program PAMSIMAS Di Kabupaten Manokwari.....	75
C. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Program PAMSIMAS Di Kabupaten Manokwari.....	85

BAB V PENUTUP

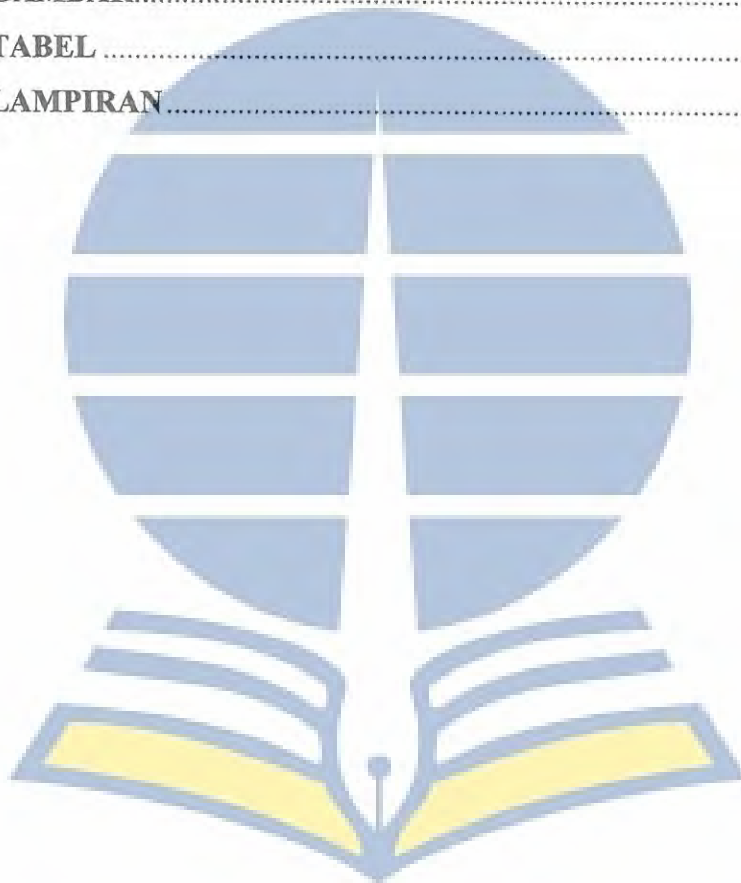
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR.....	95
---------------------------	-----------

DAFTAR TABEL.....	97
--------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN.....	100
-----------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

2.1 Tahap Evaluasi	17
2.2 Persyaratan Kelayakan Program	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	62
3.1 Komponen dalam Analisis Data	69



DAFTAR TABEL

2.1 Daftar Kampung Sasaran dan Kondisi Sarana	3
2.2 Kriteria Evaluasi	15
2.3 Model CIIP	32



DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Wawancara	100
2. Daftar Kampung Sasaran	100
3. Transkrip Wawancara	107
4. Foto - foto	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Manokwari adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Papua Barat selain kabupaten Sorong dan kabupaten Fakfak, ketiga Kabupaten ini merupakan cikal bakal terbentuknya Provinsi Papua Barat. Saat ini Provinsi Papua Barat terdiri dari 13 Kabupaten/Kota. Sebagai kabupaten tertua dan sekaligus ibukota Provinsi Papua Barat, kabupaten Manokwari menjadi sorotan masyarakat Papua Barat sekaligus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Pusat maupun lembaga sosial masyarakat baik nasional maupun internasional dalam berbagai sendi kehidupan masyarakatnya maupun penyelenggaraan pemerintahannya di banding Kabupaten lain di Provinsi Papua Barat.

Sebagian wujud perhatian lebih Pemerintah Pusat dan LSM terhadap Kabupaten Manokwari adalah perencanaan dan implementasi berbagai jenis Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Manokwari dari era program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), Program Pembangunan Desa (PPD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan), PNPM Pertanian, PNPM Mandiri Respek, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Kotaku, Pemberdayaan Keluarga Harapan (PKH), UNDP dan Unicef. Semua program pemberdayaan ini dilakukan guna memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat Kabupaten Manokwari, salah satu program pemberdayaan yang masih berjalan di Papua Barat semenjak Tahun 2008 sampai saat ini adalah

PAMSIMAS. Program ini mengkhususkan pemberdayaan masyarakat Manokwari melalui penyediaan air bersih dan sanitasi.

Penelitian ini memfokuskan pada Program PAMSIMAS. Pelaksanaan program PAMSIMAS menargetkan pada akhir tahun 2019 seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari telah mendapat akses universal 100-0-100. Artinya, 100% akses air minum-0% bebas permukiman kumuh-100% sanitasi layak. Untuk air minum aman, bebas dari permukiman kumuh, dan mendapatkan akses sanitasi layak tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Program PAMSIMAS merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yakni 100%-100% akses air minum dan sanitasi, dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Program SANITASI bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan yang tidak dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarus-utamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, perihal air minum adalah sebuah masalah. Suatu daerah yang memiliki begitu banyak sumber air dari sungai-sungai besar, sumber mata air alam yang banyak serta didukung pula dengan curah hujan yang tinggi mesti tidak mengalami kekurangan dengan perolehan air bersih. Berbeda dari yang diharapkan, pada kenyataannya akses air

bersih yang layak minum masih sangat rendah, ditambah lagi dengan pengetahuan tentang sanitasi yang juga dinilai rendah, sehingga program PAMSIMAS perlu dihadirkan di Kabupaten Manokwari untuk turut serta menangani permasalahan tersebut.

Banyak kampung di Manokwari yang telah difasilitasi oleh PAMSIMAS namun saat ini kampung-kampung tersebut tidak lagi dapat menggunakan fasilitas dari PAMSIMAS tersebut dengan berbagai macam persoalan, dari tidak berfungsinya lagi jaringan air yang tersedia sampai dengan konflik lokal yang berimbas terhadap pemutusan jaringan air sehingga berakibat tidak meratanya hasil Program PAMSIMAS di Kabupaten Manokwari.

Program Pamsimas di Kabupaten Manokwari telah hadir sejak Tahun 2008 dan yang telah difasilitasi oleh Program Pamsimas sebanyak 69 Kampung, sedangkan yang belum terlayani oleh Program Pamsimas sejumlah 97 Kampung dengan catatan telah banyak kampung yang berpindah Kabupaten akibat terjadinya pembentukan daerah otonom baru. Daftar kampung yang telah difasilitasi Pamsimas beserta kondisi sarannya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. DAFTAR KAMPUNG SASARAN DAN KONDISI SARANA

NO	NAMA KAMPUNG	KONDISI SARANA	
		BAIK	RUSAK
DISTRIK WARMARE			
1	IMBOISRATI		✓
2	NGUNGGUEN	✓	
3	DUWIN		✓
4	NIMBAY		✓
5	SNAIMBOY	✓	
6	UMCEN		✓
DISTRIK PRAFI			
7	BOGOR	✓	
8	PRAFI MULYA	✓	

9	KALI AMIN		✓
10	UHYEGBRIG		✓
11	SOMI		✓
DISTRIK SIDEY			
12	WOMNOWI		✓
13	MEYOF I		✓
14	WARUMUI		✓
15	WARIKI		✓
16	SIDEY MAKMUR	✓	
17	MANGGUPI		✓
18	SIDEY	✓	
DISTRIK MASNI			
19	YENSUM		✓
20	UNDI	✓	
21	JOWEN	✓	
22	KOYANI		✓
23	MEYERUK	✓	
24	BOWI SUBUR	✓	
25	ASKA	✓	
26	KALI MERAH	✓	
27	MEYOF II		✓
28	WAMFOURA	✓	
29	PRAFI BARAT	✓	
30	WARIORI	✓	
31	MANSABURI	✓	
32	MANTEDI	✓	
33	MUARA PRAFI	✓	
34	SIBUNI	✓	
35	YONSORIBO	✓	
36	MEIFORGA	✓	
37	MEREJEMEK		✓
DISTRIK MANOKWARI SELATAN			
38	MASYEPI	✓	
39	WARMOMI	✓	
40	WASAY	✓	
41	WELURI	✓	
42	MISAPMEYSI		
43	ANGGRESI	✓	
44	WARKOMI	✓	
45	WARSUAMI	✓	
46	ACEMO		✓
47	ANDAY	✓	
48	SOWI IV		✓
DISTRIK MANOKWARI TIMUR			
49	AROWI		✓
50	BAKARO		✓
51	AIPIRI		✓
52	SUSWENI	✓	

53	KWAWI		✓
DISTRIK MANOKWARI UTARA			
54	INODUAS	✓	
55	PAMI	✓	
56	SAIRO	✓	
57	BREMI	✓	
58	MENYUNFOKA	✓	
59	ASAI	✓	
60	MEYES	✓	
61	WARBEFOR	✓	
62	YONGGAM	✓	
DISTRIK TANAH RUBUH			
63	WARIARI	✓	
64	IMBESIKA I	✓	
65	CUYEHEP		✓
66	NINGDIP	✓	
67	WARMARWAI	✓	
68	IMHASUMA		✓
69	WARAMI	✓	

Dari lima kampung yang telah dilakukan survey awal didapati bahwa kampung yang telah difasilitasi PAMSIMAS yang dikenal dengan nama Kampung Pasca, ternyata akses masyarakat Kampung tersebut tidak tersedianya air minum lagi yang menggunakan fasilitas PAMSIMAS. Mereka telah kembali menggunakan air minum langsung ke sumber air. Kampung-kampung tersebut, antara lain: kampung Duwin (waktu observasi, Sabtu, 06 Januari 2018), kampung Imboisrati (waktu observasi, Minggu, 07 Januari 2018), kampung Kali Amin (waktu observasi, Sabtu 13 Januari 2018), kampung Arowi (waktu observasi, Minggu 14 Januari 2018), dan kampung Kwawi (waktu observasi, Minggu 14 Januari 2018).

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan program PAMSIMAS dan bagaimana pengelolaannya. Karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “*Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Manokwari*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Manokwari?
2. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan membahas:

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Manokwari.
2. Faktor penentu keberhasilan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, baik bagi pegawai sebagai individu, organisasi, maupun ilmu pengetahuan. Manfaat termaksud, yakni:

1. Manfaat praktis, memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari, agar dapat berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pamsimas dan menjaga keberlanjutan Program Pamsimas.
2. Manfaat teoretis, memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

3. Manfaat kebijakan, sebagai referensi dan pengembangan studi, kajian dan penelitian yang relevan atau lanjutan pada daerah lain dalam ruang lingkup yang lebih luas, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pada skala nasional-internasional, dengan maksud lebih pada hasil keluaran yang mantap sebagai bahan pertimbangan kebijakan secara luas dan menyeluruh pada pengelolaan kualitas kelembagaan di bidang pemberdayaan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Evaluasi

a. Definisi Evaluasi

Secara umum menurut evaluasi berarti penilaian (KBBI 1996). Evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah program dan kelanjutan program tersebut. Evaluasi juga didefinisikan sebagai: “Riset yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya dinilai dan dibandingkan dengan indikator evaluasi, serta hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut” (Wirawan, 2012). Sedangkan menurut Hadi (2011) evaluasi adalah “proses pengumpulan informasi tentang sebuah objek, menilai objek tersebut, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Sedangkan Azwar (1996) berpendapat bahwa Evaluasi adalah proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis pada komparasi antara standar atau kriteria yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh. Melalui hasil perbandingan tersebut kemudian disusun suatu kesimpulan dan saran pada setiap aktivitas pada program.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang

selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif. Sudijono (1996) mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan tahapan penilaian yang dilakukan terhadap objek evaluasi, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang mana hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi. Dalam penelitian ini objek yang akan dievaluasi adalah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Manokwari. Melalui proses evaluasi akan dilihat bagaimana pelaksanaan program penyediaan air minum dan faktor apa saja yang menghambat program tersebut.

b. Tujuan Evaluasi

Secara umum evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas program, memberikan penilaian, memberikan kepuasan pada kinerja dan menganalisis setiap hasil yang telah direncanakan. Menurut

Suprihanto (1988) evaluasi pada organisasi memiliki 3 tujuan yakni:

- 1) Sebagai alat untuk memperbaiki dan merencanakan kegiatan selanjutnya,
- 2) Memperbaiki penggunaan dan penyediaan berbagai sumber daya, sumber dana, dan manajemen di masa mendatang, serta
- 3) Memperbaiki proses pelaksanaan dan segala faktor yang berpengaruh,
- 4) Merencanakan ulang program dengan mengontrol keterkaitan pada perubahan yang terjadi pada program sebelumnya dan
- 5) mengukur progress yang telah direncanakan.

Lavinghouze (2007), berpendapat bahwa kegiatan evaluasi dilakukan untuk: 1) menyediakan pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat, stakeholder, dan lembaga donor; 2) membantu menentukan tujuan yang telah ditentukan pada perencanaan; 3) meningkatkan program implementasi; 4) memberikan kontribusi untuk pemahaman ilmiah tentang hasil suatu program; dan 5) meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap masyarakat, dan 6) menginformasikan kebijakan.

Sedangkan evaluasi proses dilakukan untuk: 1) Menilai pencapaian program; 2) Menilai kepuasan sasaran; 3) Menilai pelaksanaan aktivitas program; 4) Menilai tampilan komponen dan material program.

Sementara itu, menurut Arikunto (2013) evaluasi memiliki dua tujuan yaitu umum dan khusus. Tujuan umum menitikberatkan pada program secara menyeluruh sedangkan tujuan khusus difokuskan pada setiap komponen dalam manajemen organisasi.

Berdasarkan ruang lingkupnya evaluasi dapat dibedakan

menjadi empat kelompok yaitu : 1) evaluasi terhadap masukan (*input*) yang menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber dana, tenaga dan ataupun sumber sarana; 2) evaluasi terhadap proses (*process*) lebih dititik beratkan pada pelaksanaan program, apakah sesuai rencana, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; 3) evaluasi terhadap keluaran (*output*), evaluasi pada tahap akhir ini adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program telah selesai dilaksanakan (*summative evaluation*) yang tujuan utamanya secara umum dapat dibedakan atas dua macam yaitu untuk mengukur keluaran serta untuk mengukur dampak yang dihasilkan, 4) Evaluasi terhadap dampak (*impact*) mencakup pengaruh yang timbul dari program yang dilaksanakan (Azwar A. , 1996).

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 4 kebijakan yang dapat diterapkan dalam sebuah program, yakni:

1. Menghentikan suatu program karena program tersebut tidak memiliki manfaat maupun tidak sesuai rencana awal.
2. Melakukan revisi terhadap program apabila terdapat bagian yang tidak sesuai dengan perencanaan.
3. Melanjutkan program jika program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan manfaat.
4. Menduplikasi program dengan menjalankan program di berbagai tempat atau mengulangi program di waktu yang berbeda karena program sebelumnya dianggap berhasil.

Apabila dilihat dari segi pentahapan, secara umum evaluasi dapat

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan. Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Kegiatan evaluasi pada tahapan ini adalah menganalisa dan menentukan level perkembangan pada penerapan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Hampir serupa pada tahap pelaksanaan namun evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan memiliki obyek yang berbeda untuk dianalisa. Tahapan ini membandingkan perencanaan dengan hasil pelaksanaan. Bagaimana dampak yang dihasilkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan. Apakah sesuai dengan harapan atau tidak.

c. Jenis-Jenis Evaluasi

Menurut Mantra (1997), secara umum evaluasi dibedakan atas beberapa jenis, seperti:

1. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat merencanakan suatu program dengan tujuan menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program agar program sesuai dengan masalah atau kebutuhan masyarakat.
2. Evaluasi proses adalah proses yang memberikan gambaran tentang

apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan memastikan keterjangkauan elemen fisik dan struktural dari program tersebut.

3. Evaluasi sumatif yaitu memberikan pernyataan efektif suatu program selama kurun waktu tertentu dan dimulai setelah program berjalan.
4. Evaluasi dampak program yaitu menilai keseluruhan efektifitas program dalam menghasilkan target sasaran.
5. Evaluasi hasil yaitu menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk sekelompok penduduk tertentu.

Berdasarkan waktu pelaksanaan, evaluasi dibagi menjadi 2 jenis:

1. Evaluasi Formatif. Evaluasi ini dijalankan saat pelaksanaan dan fokus program prioritas melalui perbaikan tujuan pelaksanaan. Hasil evaluasi biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan.
2. Evaluasi Summatif. Evaluasi Summatif diterapkan saat pelaksanaan dan fokus program prioritas telah usai dilakukan. Evaluasi ini memiliki tujuan dalam penilaian hasil pelaksanaan. Hasil evaluasi summatif meliputi pencapaian prioritas dari pelaksanaan/aktivitas prioritas.

Sedangkan berdasarkan tujuannya maka evaluasi dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. Evaluasi Formulasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mengkaji kembali formulasi terkait penyusunan kebijakan maupun kegiatan yang telah disusun dengan metode yang sesuai.
2. Evaluasi Proses. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Evaluasi Biaya. Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui apakah biaya prioritas dalam rangka pencapaian tujuan telah ditetapkan.
4. Evaluasi Dampak. Evaluasi ini mengkaji dampak dan kebermanfaatannya yang diberikan dari program prioritas yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah evaluasi hasil, dimana melalui evaluasi ini penulis menilai perubahan-perubahan atau perbaikan yang terjadi dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Monokwari.

d. Tipe-Tipe Evaluasi

Finsterbusch dan Motz dalam (Wibawa dkk, 1994) yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) tipe evaluasi yaitu:

1. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
2. *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari

- jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
3. *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarnya.
 4. *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

e. Kriteria Evaluasi

Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya akan bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn mencakup enam kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi

Tipe/Kriteria Evaluasi	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: (Dunn, Pengantar Analisa Kebijakan Publik, 2000)

f. Proses Evaluasi

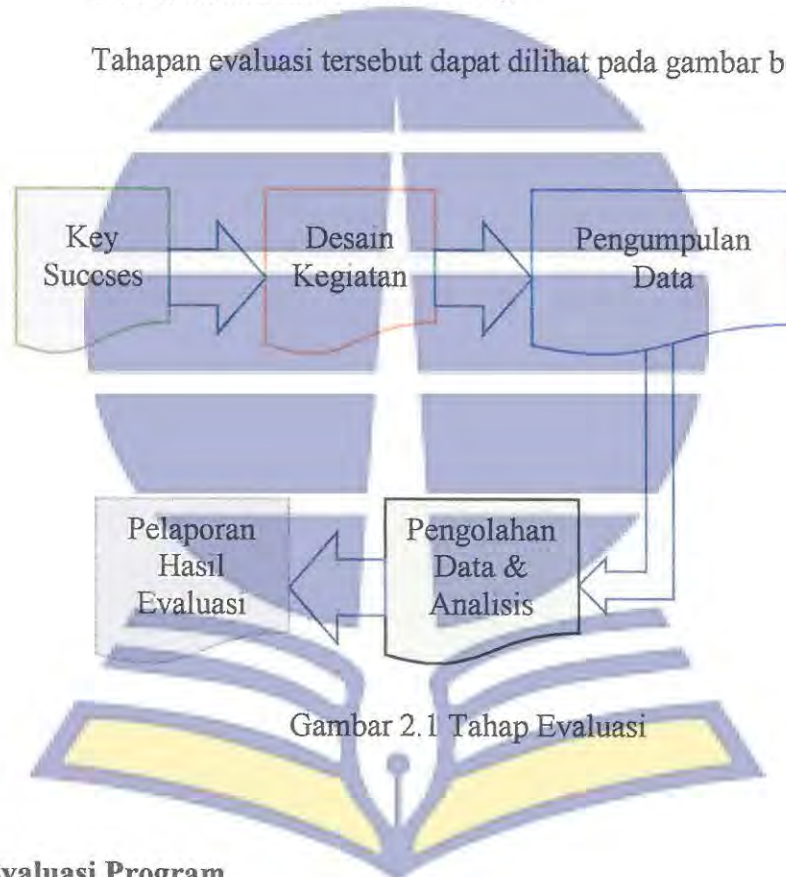
Pada umumnya proses evaluasi memiliki beberapa tahapan yang berbeda-beda. Namun demikian hal tersebut bukanlah sebuah kendala, karena yang terpenting adalah prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi. Berikut ini adalah beberapa tahapan evaluasi yang biasanya digunakan adalah:

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, segala sesuatu yang dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Juga memperhatikan aspek-aspek yang mungkin dapat dan perlu dievaluasi. Namun, secara umum yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.
2. Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, harus menentukan terlebih dahulu desain evaluasinya, agar data yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja yang dilalui, siapa yang akan terlibat, serta apa yang akan dihasilkan menjadi jelas.
3. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
4. Pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul, diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai. Hal ini bertujuan agar dapat

menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, fakta dan harapan/rencana dikomparasi untuk menghasilkan gap. Besarnya gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasi.

5. Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Tahapan evaluasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

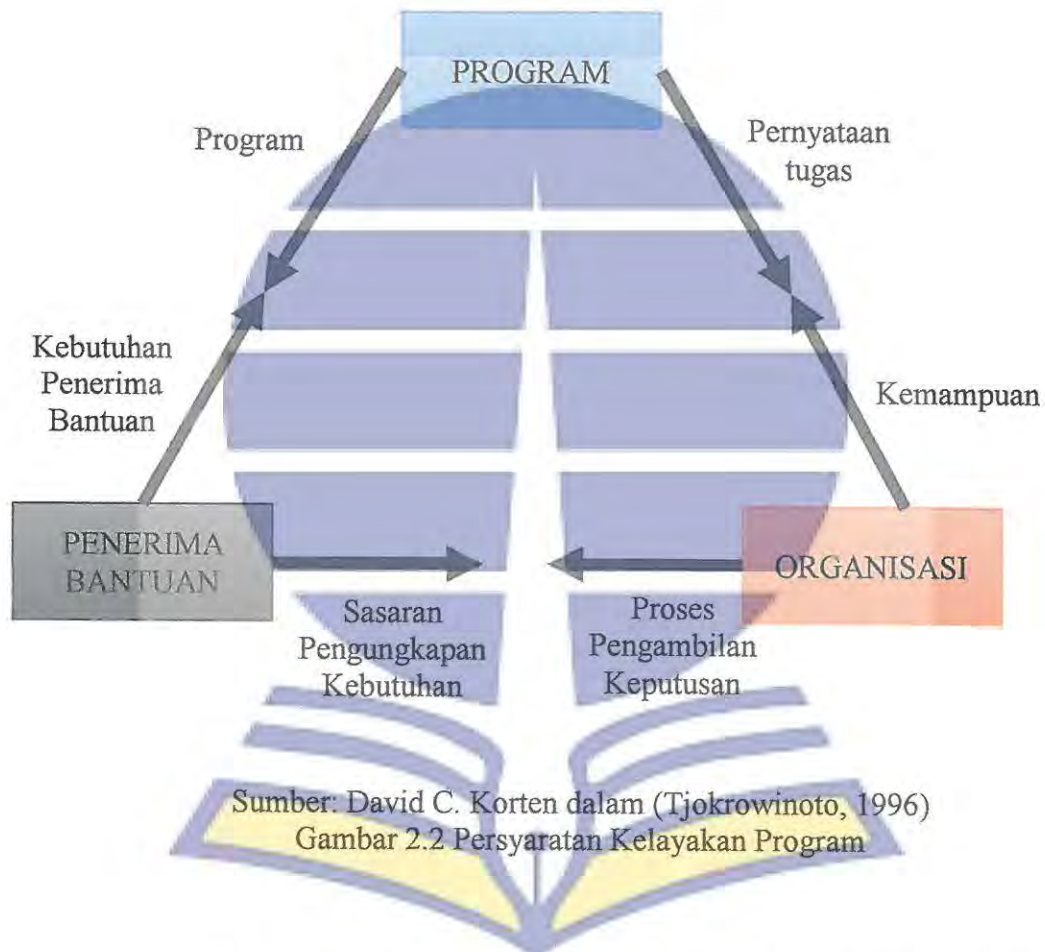


Gambar 2.1 Tahap Evaluasi

2. Evaluasi Program

David C. Korten dalam Moeljarto Tjokrowinoto (1996) mengemukakan konsep tentang Three Way Fit atau kesesuaian tiga arah terkait dengan program-program pembangunan. Teori ini menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptibilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program

dikemukakan sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (beneficiaries), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program. Secara skematis persyaratan kelayakan program dapat dikemukakan dalam gambar berikut:



Menurut David C. Korten, program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada hubungan erat atau sinergi (kesesuaian) antara:

- a. Kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program;
- b. Persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana;
- c. Kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan

dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.

Lebih lanjut David C. Korten menjelaskan bahwa salah satu tantangan penting yang dihadapkan pada pembangunan yang memihak rakyat ialah mengubah arah birokrasi pembangunan yang penting-penting sehingga menjadi organisasi yang menghargai dan memperkuat sifat manusia baik dikalangan birokrasi itu sendiri maupun dikalangan warga negara yang hendak dilayaninya. Oleh karena itu sangat penting bagi *decision maker* untuk melakukan evaluasi program guna mengetahui keberhasilan dan ketercapaian program yang telah dilaksanakan.

a. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu obyek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas (Subari, 2005). Ini berarti bahwa evaluasi program dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, data dan informasi untuk mengumpulkan harga nilai evaluasi yang merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi. Terdapat beberapa pengertian tentang program. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi

program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto S. , 1993).

Cronbach & Stufflebeam, dalam (Agus, 2011), berpendapat bahwa evaluasi program merupakan upaya penyediaan informasi yang disampaikan kepada pengambil keputusan. Antara evaluasi program dan kebijakan terdapat hubungan yang erat, di mana keduanya merupakan rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan terlaksana atau tidak, diperlukan adanya evaluasi program. Informasi dari hasil kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk membuat kebijakan lanjutan dari program. Dari hasil evaluasi program itu juga para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dari hasil program untuk mengambil keputusan (Rutman, 1984).

Lebih lanjut Brinkerhoff, et.al (1983) menyatakan bahwa evaluasi program merupakan:

1. Proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terealisasi.
2. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan
3. Perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan

4. Penilaian tentang harga dan kualitas
5. Ukuran, pilih yang dikembangkan, dengan itu masing-masing tujuan ditentukan
6. Investigasi sistematis mengenai nilai atau kualitas suatu objek.

Sedangkan menurut Isaac dan William dalam (Suparman & Zulhairi, 2004) evaluasi program menyandarkan dan mewujudkan tiga rangkaian tahapan yaitu:

1. Tujuan, nyatakan secara jelas dan spesifik masing-masing tujuan satu term yang bisa diukur dan diamati.
2. Sarana, rencanakan sebagai strategi dan aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai masing-masing tujuan.
3. Ukuran, pilih dan kembangkan ukuran-ukuran yang dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan.

Sedangkan Bigman dalam (Rutman, 1984) berpendapat bahwa terdapat beberapa pemakaian evaluasi program, yaitu:

1. Untuk menemukan apakah tujuan dapat dicapai dan seberapa jauh dapat dicapai
2. Untuk menemukan alasan keberhasilan dan kegagalan secara khusus tujuan suatu program
3. Untuk menemukan prinsip yang melandasi keberhasilan program
4. Untuk melakukan eksperimen-eksperimen dengan teknik-teknik tertentu guna meningkatkan efektifitas
5. Untuk meletakkan dasar guna melakukan penelitian lanjutan atas dasar keberhasilan alternatif teknik yang digunakan

6. Untuk merumuskan kembali cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan bahkan merumuskan kembali sub tujuan sesuai dengan temuan penelitian.

Evaluasi program yang dilakukan tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan atau proses belajar mengajar saja. Evaluasi program dapat juga dilakukan untuk konteks yang lebih luas, seperti program untuk masyarakat, misalnya program pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi program merupakan kombinasi antara teori yang digunakan untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pengambilan kebijakan dan praktis penilaian yang di dalamnya evaluator mengumpulkan data sebagai informasi pendukungnya (Sukardi, 2013). Sedangkan pedoman evaluasi program yang diterbitkan oleh Direktorat Dirjen PLS Depdiknas dalam (Karding, 2008) memberikan pengertian evaluasi program adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan. Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2004) mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasari atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan

menggunakan standar yang telah dibakukan.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi program di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi program merupakan sebuah proses pengumpulan data secara sistematis, terencana dengan menggunakan metode dan alat ukur yang sesuai untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan, efektifitas atau kecocokan suatu program apakah sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasari atas perbandingan terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar yang telah dibakukan.

b. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan evaluasi. Tujuan evaluasi menurut Suharsimi Arikunto (2013) ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Setiap implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan

informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

Menurut Mulyatiningsih (2011), pelaksanaan evaluasi program bertujuan untuk:

1. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
2. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Oleh karena itu evaluasi program merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah untuk melaksanakan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009), terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Selain itu, dalam kegiatan penelitian, peneliti juga dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program evaluator ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan

program, sehingga apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, evaluator ingin mengetahui letak kekurangan dan penyebabnya yang akan merujuk pada pembuatan kesimpulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir sebuah kebijakan yang sudah dibuat, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

c. Model-model evaluasi program

Sejak kemunculannya, evaluasi terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Bidang kajian evaluasi telah banyak bermanfaat dan berkontribusi dalam memberikan informasi maupun data, terutama dalam melaksanakan suatu program. Program yang telah dievaluasi pada gilirannya akan menghasilkan rekomendasi dan digunakan oleh pelaksana program untuk menentukan keputusan, apakah program tersebut dihentikan, dilanjutkan, atau ditingkatkan lebih baik lagi. Hingga kini, evaluasi sering digunakan oleh hampir semua bidang dalam suatu program tertentu seperti, evaluasi program training pada sebuah perusahaan, evaluasi program pembelajaran dalam pendidikan, evaluasi program kesejahteraan masyarakat, maupun evaluasi kinerja para pegawai negeri sipil pada sebuah instansi tertentu.

Dalam pelaksanaannya implementasi evaluasi dapat berbeda satu sama lain, tergantung dari maksud dan tujuan evaluasi tersebut. Misalnya, evaluasi program pembelajaran dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil belajar telah tercapai dengan optimal sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan untuk melihat kualitas, loyalitas, atau motivasi kerja pegawai, sehingga akan menentukan hasil produksi. Sedangkan evaluasi program bertujuan untuk melihat sejauh mana program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana atau tidak yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi sesuai hasil evaluasi. Dari perbedaan tersebut muncul beberapa model evaluasi yang dapat menjadi pertimbangan evaluator dalam melakukan evaluasi.

Kaufman dan Thomas dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), membedakan evaluasi menjadi 8 (delapan) model, yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
2. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
3. *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven.
4. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
5. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
6. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
7. *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam.

8. *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus.

Dari 8 (delapan) model evaluasi yang ada, penulis hanya akan membahas 2 (dua) model evaluasi yakni *Goal Free Evaluation* (GFE) yang dikembangkan oleh Scriven dan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam.

1. *Goal Free Evaluation* (GFE)

Pada tahun 1972 Michael Scriven mengembakan sebuah model evaluasi yang diberinama *Goal Free Evaluation* (GFE). Model *Goal Free Evaluation* (evaluasi lepas dari tujuan) justru menjauh dari tujuan. Model ini tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang diperhatikan justru adalah bagaimana proses pelaksanaan program, dengan jalan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaannya, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Dalam model GFE para evaluator atau penilai mengambil dari berbagai laporan atau catatan berkaitan dengan pengaruh-pengaruh nyata atau kongkrit dan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam sebuah program. Perhatian khusus diberikan secara tepat terhadap usulan-usuan tujuan dalam evaluasi, tetapi tidak dalam proses atau produk.

Keuntungan dari GFE adalah dengan GFE para penilai mengetahui antisipasi pengaruh-pengaruh penting terhadap tujuan dasar dari penilai yang menyimpang. Sedangkan ciri-ciri Evaluasi Bebas Tujuan yaitu:

- a. Evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program.
- b. Tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan menyempitkan fokus evaluasi.
- c. Evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan.
- d. Hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek dibuat seminimal mungkin.
- e. Evaluasi menambah kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan.

Scriven menunjukkan bahwa fokus pada program atau tujuan suatu kegiatan dapat menjadi tempat awal yang penting untuk teknolog bekerja dalam domain evaluasi. Scriven percaya bahwa “tujuan program tertentu tidak harus diambil sebagai yang diberikan”, tapi diperiksa dan dievaluasi. Model Goal Free berfokus pada hasil yang sebenarnya dari suatu program atau kegiatan, bukan hanya tujuan-tujuan yang teridentifikasi. Jenis model memungkinkan teknolog untuk mengidentifikasi dan mencatat hasil yang tidak mungkin telah diidentifikasi oleh perancang program (Guskey, 2000). Melalui proses teknik baik terang-terangan dan terselubung, metode ini berusaha untuk mengumpulkan data untuk membentuk deskripsi program, mengidentifikasi proses akurat, dan menentukan pentingnya mereka ke program (Boulmetis & Dutwin, 2005).

GFE atau evaluasi bebas tujuan berfungsi untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas. Dalam evaluasi yang berorientasi pada tujuan, seorang evaluator secara subjektif akan membatasi persepsinya sesuai dengan tujuan. Padahal tujuan pada umumnya hanya formalitas dan jarang menunjukkan tujuan yang sebenarnya dari suatu proyek. Lagipula, banyak hasil program penting yang tidak sesuai dengan tujuan program. Evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya bukan pada hasil yang direncanakan. Dalam evaluasi bebas tujuan ini, memungkinkan evaluator untuk menambah temuan hasil atau dampak yang tidak direncanakan.

Scriven mengemukakan bahwa *Goal Free Evaluation* memiliki kelebihan dan kekurangan seperti berikut ini:

a. Kelebihan Model *Goal Free Evaluation*

- 1) Evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci setiap komponen, tetapi hanya menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka (bias).
- 2) Model ini menganggap pengguna sebagai audiens utama. Melalui model ini, Scriven ingin evaluator mengukur kesan yang didapat dari sesuatu program dibandingkan dengan kebutuhan pengguna dan tidak membandingkannya dengan pihak penganjur.
- 3) Pengaruh konsep pada masyarakat, bahwa tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan,

seorang penilai bisa melakukan evaluasi.

- 4) Kelebihan lain, dengan munculnya model bebas tujuan yang diajukan oleh scieven, adalah mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh tidak saja yang direncanakan, tetapi juga dapat diperhatikan sampingan lain yang muncul dari produk.

b. Kelemahan Model *Goal Free Evaluation*

- 1) Model bebas tujuan ini pada umumnya bebas menjawab pertanyaan penting, seperti apa pengaruh yang telah diperhitungkan dalam suatu peristiwa dan bagaimana mengidentifikasi pengaruh tersebut.

- 2) Walaupun ide scieven bebas tujuan bagus untuk membantu kegiatan yang paralel dengan evaluasi atas dasar kejujuran, pada tingkatan praktis scieven tidak terlalu berhasil dalam menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan.

- 3) Tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan walau pada akhirnya mengarah pada penilaian kebutuhan.

- 4) Diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan evaluasi model ini.

- 5) Langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasaran saja.

- 6) Model bebas tujuan merupakan titik evaluasi program,

dimana objek yang dievaluasi tidak perlu terkait dengan tujuan dari objek atau subjek tersebut, tetapi langsung kepada implikasi keberadaan program apakah bermanfaat atau tidak objek tersebut atas dasar penilaian kebutuhan yang ada.

2. Model CIPP (*Context, Input, Proses, and Product*)

Model evaluasi CIPP adalah salah satu jenis model yang dikembangkan untuk membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, yang pada akhirnya sampai pada deskripsi dan keputusan mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Model ini dikembangkan Daniel Stufflebeam, dkk pada tahun 1967 di Ohio State University dengan berlandaskan pada keempat komponen/aspek evaluasi yaitu context, input, process, dan product. Empat komponen tersebut membantu pengambil keputusan untuk menjawab empat pertanyaan dasar tentang:

- a. Apa yang harus dilakukan (*What should we do?*). pertanyaan ini berkaitan dengan usaha mengumpulkan dan menganalisa *needs assessment* data untuk menentukan tujuan, prioritas dan sasaran.
- b. Bagaimana melaksanakannya (*How should we do it?*). pertanyaan ini berkaitan dengan sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan

dan mungkin meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi.

- c. Apakah pelaksanaannya sesuai rencana (*Are we doing it as planned?*). Pertanyaan ini berkaitan dengan penyediaan informasi untuk pengambil-keputusan tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan terus-menerus monitoring program, pengambil-keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, dukungan staff dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran.
- d. Apakah berhasil (*Did it work?*); Dengan mengukur *outcome* dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil-keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

Adapun aspek-aspek Model CIPP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Model CIIP

Aspek Evaluasi	Tipe dari pengambilan keputusan	Jenis Pertanyaan
Context evaluation	Planning decisions	What should we do?
Input evaluation	Structuring decisions	How should we do it?
Process evaluation	Implementing decisions	Are we doing it as planned? And if not, why not?
Product evaluation	Recycling decisions	Did it work?

Dalam pelaksanaannya, model evaluasi CIPP lebih

banyak digunakan oleh para evaluator, karena lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Model ini bertujuan untuk membantu administrator dalam membuat keputusan. Stufflebeam, (2003) dalam Eko Putro Widoyoko (2009) mengungkapkan bahwa, “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve.*” Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk meningkatkan. Stufflebeam melihat tujuan evaluasi sebagai penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif; membantu pendengar untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau obyek; dan membantu pengembangan kebijakan dan program.

Komponen atau aspek model CIPP yang meliputi, *context, input, process, product* dijabarkan seperti berikut ini:

a. Evaluasi Konteks

Menurut Stufflebeam (1983) dalam Hamid Hasan (2009) tujuan utama evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan demikian evaluator akan dapat memberikan arah

perbaikan yang diperlukan. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2009) menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Dalam tulisan ini, penulis memberikan contoh evaluasi program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Manokwari dalam pengajuan pertanyaan evaluasi seperti berikut:

- 1) Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dalam program, misalnya penyediaan air minum dan sanitasi bagi kampung yang belum menerima?
- 2) Tujuan pengembangan apa yang belum tercapai oleh program, misalnya peningkatan kesehatan masyarakat karena adanya penyediaan air minum dan sanitasi?
- 3) Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, misalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan?
- 4) Tujuan-tujuan manakah yang paling mudah dicapai, misalnya pemerataan penyediaan air bersih dan sanitasi, ketepatan penyediaan air bersih dan sanitasi?

b. Evaluasi input (masukan)

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi *input*, atau evaluasi masukan. Melalui evaluasi masukan administrator

dibantu untuk mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, rencana dan strategi apa yang diperlukan guna mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya (Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik, 2009). Komponen evaluasi terdiri dari: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap evaluasi masukan ini adalah:

- 1) Apakah penyediaan air minum dan sanitasi berdampak jelas pada kesehatan masyarakat?
- 2) Berapa kampung yang menerima dengan senang hati penyediaan air minum dan sanitasi?
- 3) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kesehatan mereka setelah disediakan air minum dan sanitasi?

Menurut Stufflebeam dalam (Arikunto S. , 2004), pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.

c. Evaluasi Proses

Menurut Worthen & Sanders dalam (Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi

Pendidik dan Calon Pendidik, 2009) evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan : “1) *do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage*, 2) *to provide information for programmed decision*, and 3) *to maintain a record of the procedure as it occurs* “. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktek pelaksanaan program.

Pada dasarnya evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut (Arikunto S. , 2004), evaluasi proses dalam model CIPP merujuk pada kegiatan “apa” (*what*) yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, dan “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Stufflebeam mengusulkan beberapa pertanyaan untuk

evaluasi proses seperti berikut:

- 1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
- 2) Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
- 3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- 4) Hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan hambatan jika program dilanjutkan?

d. Evaluasi Produk/Hasil

Menurut Sax (1980) dalam (Widoyoko, 2009) evaluasi produk/hasil adalah *“to allow to project director (or teacher) to make decision of program”*. Dari evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam membuat keputusan berkaitan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Sementara menurut Farida Yusuf Tayibnapi dalam (Widoyoko, 2009) evaluasi produk dilakukan untuk membantu pembuatan keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan. Pada tahap evaluasi ini pertanyaan evaluasi yang diajukan adalah seperti berikut:

- 1) Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
- 2) Pernyataan-pernyataan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan?
- 3) Dalam hal apakah berbagai kebutuhan masyarakat sudah dapat dipenuhi selama proses penyediaan air minum dan sanitasi?
- 4) Apakah dampak yang diperoleh masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program penyediaan air minum dan sanitasi ini?

Menurut Widoyoko (2009) model evaluasi CIPP lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain kelebihan tersebut, di satu sisi model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya pengembangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat beberapa kelebihan dan kelemahan model evaluasi CIIP jika dilihat dan dibandingkan dengan model evaluasi lainnya.

a. Kelebihan

- 1) Merupakan sistem kerja yang dinamis
- 2) Memiliki pendekatan yang bersifat holistik yang bertujuan memberikan gambaran yang detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteks hingga saat proses implementasinya.
- 3) Dapat melakukan perbaikan selama program berjalan maupun dapat memberikan informasi final.
- 4) Lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi
- 5) Mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya.

b. Kekurangannya

- 1) Tidak terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan yang sedang berlangsung.
- 2) Kurang adanya modifikasi juga berdampak pada tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi.
- 3) Cenderung fokus pada *rational management* daripada mengakui realita yang ada.

- 4) Terkesan *top down* dengan sifat manajerial dalam pendekatannya.
- 5) Bila diterapkan secara terpisah (*partial*) akan melemahkan ide dasar.

d. Kriteria Evaluasi Program

Menurut William Dunn (1999), evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya :

1. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi fakta-nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dan aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan

prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

4. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan), dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan nilai lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Karakteristik tersebut jika diterapkan pada Evaluasi Program Pamsimas maka:

1. Evaluasi program ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk mewujudkan program pemerintah 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi

pada 2019.

2. Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen yang mendukung keberhasilan program, yaitu sumber daya manusia serta manajemen program yang baik.
3. Keberhasilan yang dinikmati sekarang oleh target group maupun non target group merupakan hasil dari proses perencanaan dan implementasi yang baik, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor kebijakan di masa lalu.
4. Evaluasi merupakan tujuan sekaligus cara mengukur keberhasilan program Pamsimas.

Di dalam mengevaluasi suatu program, seorang peneliti harus menentukan kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa program itu berhasil atau tidak, mendekati tujuan atau tidak. Kriteria yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah efektifitas program dan efisiensi program. Efektifitas program merujuk pada tingkat pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output/sumber daya yang digunakan oleh program dan outputnya atau layanan apa yang diterima oleh target group (Henry, 1988:233).

Lebih lanjut William Dunn (1999) menyebutkan 6 (enam) kriteria evaluasi yakni:

1. Efektifitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari diadakannya tindakan.

2. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisien.

3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tindakan efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Keadilan

Berat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada keadilan adalah kebijakan yang akibatnya secara adil didistribusikan.

5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan preferensi. Kriteria ini penting, karena analisis yang dapat memuaskan kriteria-kriteria diatas, masih dianggap gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kriteria evaluasi program oleh William Dunn (1999) yang sudah dijelaskan dapat digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Manokwari.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan perlu melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*community based development*). Sebuah pembangunan idealnya dimulai dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pula. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan perlu melihat berbagai aspek, karena pemahaman tentang pemberdayaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung dari cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik dan sosial budayanya. Bagi sebagian orang pemberdayaan dipahami sebagai proses untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Namun ada juga

yang memahami pemberdayaan sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembangunan.

Prijono dan Pranarka dalam Sulistiyani (2004) berpendapat bahwa dalam istilah pemberdayaan terkandung dua arti yakni: *to give power or authority* dan *to give ability to or enable*. Pada pengertian pertama terkandung makna pemberian kekuasaan, pengalihan kekuatan atau pendelegasian otoritas terhadap pihak yang kurang atau yang belum berdaya. Sedangkan dalam pengertian kedua bermakna pemberian kemampuan atau pemberdayaan serta pemberian peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu ditekankan bahwa masyarakat bukanlah obyek dari berbagai program atau proyek pembangunan terutama pembangunan desa, melainkan subyek pembangunan, artinya masyarakat haruslah menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Menurut Suharto (2006) pemberdayaan merupakan sebuah proses, di mana individu dan komunitas menguasai dan mengontrol hidup mereka sendiri dan berpartisipasi secara demokratis dalam lingkup kehidupan mereka. Oleh karena itu, di dalam pemberdayaan mencakup tiga dimensi yakni: kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik dan kompetensi partisipatif.

Menurut catatan Ife dalam bukunya Huda (2009) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Ife menuliskan bahwa: "*Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*".

Dari pernyataan ini, dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaan terdapat dua kata kunci, yakni kekuasaan dan kekurangberuntungan.

- a. Kekuasaan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, sering terjadi kompetisi yang tidak seimbang antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik sebagai penguasa terkadang menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak ada yang mendominasi.
- b. Kekurangberuntungan. Akibat lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Dengan demikian pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.

Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan untuk memacu kekuatan masyarakat dalam membuka akses yang seluas-luasnya sehingga tidak lagi dimonopoli dan didominasi oleh kekuasaan. Dalam hal ini kelompok masyarakat harus mampu mendayagunakan segala potensi maupun sumber daya yang mereka miliki demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian yang diharapkan. Untuk mencapai keseimbangan antara pemerintah dan semua elemennya, maka harus melakukan pemberdayaan secara berkesimbangan, menyeluruh, dan simultan. Oleh karena itu dalam pandangan Ndraha (2003:132), masyarakat memerlukan berbagai program pemberdayaan, seperti:

1. Pemberdayaan politik. Untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) masyarakat terhadap pemerintah dibutuhkan pemberdayaan politik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan hak mereka baik dalam bentuk barang, jasa, layanan, maupun kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Menurut Utomo birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah birokrasi yang kehidupan kerjanya berkualitas (*quality of work life*) dan berorientasi kepada: a) keterlibatan dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*); b) program pengembangan karir (*career development program*); c) gaya kepemimpinan (*leadership style*); d) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (*the degrees of stress experienced by employees*); e) budaya organisasi (*the culture of the organization*).
2. Pemberdayaan ekonomi, merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai konsumen sehingga dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan sosial-budaya, dilakukan agar kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* dapat ditingkatkan dengan demikian nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan yang adil terhadap manusia juga meningkat.
4. Pemberdayaan lingkungan, dilakukan agar program perawatan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan, sekaligus masyarakat dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling

menguntungkan.

Untuk Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan adanya strategi khusus. Menurut Ife (2008) terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan, yakni:

1. Perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*). Untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimungkinkan adanya akses terhadap berbagai sumber kehidupan dengan melakukan pengembangan perubahan struktur dan institusi. Pemegang kekuasaan dapat merancang perencanaan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dengan menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi mereka. Misalnya: kebijakan membuka peluang kerja yang luas atau Upah Minimum Regional (UMR) yang tinggi (*poverty* dan pengangguran).
2. Aksi sosial dan politik (*sosial dan political action*), memungkinkan masyarakat ikut ambil bagian dalam sistem politik dengan diubahnya sistem politik yang tertutup. Keterlibatan masyarakat secara politik sangat berpeluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan.
3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan. Seringkali masyarakat/kelompok tertentu tidak menyadari adanya penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi semakin diperparah dengan minimnya skill yang dimiliki untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan bagi masyarakat diharapkan masalah tersebut dapat teratasi. Contoh: membuka pemikiran masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur

penindasan terjadi, memberi sarana dan *skill* agar mencapai perubahan secara efektif.

Melalui pemberdayaan masyarakat suatu kelompok atau masyarakat dimungkinkan untuk mampu bertahan (*survive*) dan dalam arti yang dinamis melakukan pengembangan diri untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Hal ini bertitik tolak dari pemikiran pemikiran bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang mereka miliki sehingga berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, dan membuka berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan perlu adanya kontrol sehingga dapat mencegah yang lemah menjadi semakin lemah.

Dalam melakukan pemberdayaan, manusia atau masyarakat perlu ditempatkan sebagai subyek (pelaku) pembangunan dan bukan sebagai obyek. Pranarka dan Moeljarto dalam Prijono dan Pranarka (1996)

memiliki pemikiran yang sejalan dengan dimensi tersebut di atas. Dengan menempatkan manusia atau masyarakat sebagai subyek, dapat bermakna:

1. Titik tekan proses pemberdayaan terletak pada pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Dalam proses ini diperlukan upaya untuk membangun aset material yang dapat mendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi. Kecenderungan dalam proses itu dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Titik tekan proses pemberdayaan terletak pada upaya menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menemukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog, sehingga kecenderungan ini dapat dipahami sebagai kecenderungan yang bersifat sekunder.

Melalui pemberdayaan diharapkan kualitas kehidupan individu atau masyarakat dapat ditingkatkan sehingga berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat, agen pemberdayaan harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberdayaan yang menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bersikap demokratis untuk menghindari paksaan. Dalam pemberdayaan setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara

satu dengan lainnya terutama berkaitan dengan kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi.

2. Didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sasaran. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi. Oleh karena itu dalam pemberdayaan, sasaran perlu dimotivasi untuk menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk mengembangkan potensi dan kebutuhannya agar dapat mandiri. Potensi dan kebutuhan sasaran perlu digali secara tepat dan akurat agar proses pemberdayaan berjalan maksimal.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dengan demikian dapat menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan secara tepat.
4. Menumbuhkan nilai-nilai luhur, budaya dan kearifan lokal dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
5. Pemberdayaan bukanlah proses yang instan tetapi membutuhkan waktu yang lama, karena itu perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dapat dimulai dengan yang sifatnya sederhana menuju hal yang kompleks.
6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan. Karena itu diperlukan

adanya kesabaran dan kehati-hatian dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.

7. Melakukan pemberdayaan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan (remaja dan ibu-ibu muda) yang berpotensi dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
9. Melakukan pemberdayaan untuk menumbuhkan kebiasaan agar terus belajar (*lifelong learning/education*) dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar dapat diperoleh dengan berbagai sarana seperti: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Melalui pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
10. Memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
11. Menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya yang dimulai dengan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
12. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, dimulai dari: mau

berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan *networking* sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.

13. Agen/petugas pemberdayaan perlu memiliki kompetensi yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
14. Melibatkan berbagai pihak mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya sesuai peran, potensi dan kemampuannya.

Berkaitan dengan hal di atas, Delivery menawarkan beberapa tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Rincian masing-masing tahap dijabarkan seperti berikut:

- a. Seleksi lokasi.
- b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat.
- c. Proses pemberdayaan masyarakat, yakni: Kajian keadaan pedesaan partisipatif, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan.
- d. Monitoring dan evaluasi partisipatif.
- e. Pemandirian masyarakat.

4. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia yang

dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program ini didukung sepenuhnya oleh Bank Dunia. Tujuan Program Pamsimas adalah meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk mereka yang memiliki pendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Melalui Pamsimas, masyarakat diharapkan dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini dilakukan guna mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (www.pamsimas.org).

Berdasarkan data yang diperoleh dari www.pamsimas.org, pada tahun 2008 sampai tahun 2012 telah dilaksanakan program Pamsimas I di 110 Kabupaten/Kota dari 15 Provinsi. Program ini berjalan lancar di mana Pamsimas I berhasil diterapkan pada 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) desa, terdiri dari 6.262 (enam ribu dua ratus enam puluh dua) desa reguler dan sekitar 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) desa replikasi. Sedangkan Program Pamsimas II dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Program Pamsimas II ditargetkan akan dilaksanakan di sekitar 5000 desa di 32 provinsi di 220 Kab/Kota.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ternyata masih banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki akses air minum dan sanitasi. Untuk itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yang telah berhasil menurunkan

separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengupayakan akses air bersih dan sanitasi diwujudkan dengan peluncuran program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 dengan target ketercapaian 100% masyarakat Indonesia dapat memiliki akses terhadap air minum.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat, pemerintah membuat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Dalam perkembangannya, Pamsimas telah menjadi salah satu program andalan nasional baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan melaksanakan Program Pamsimas I pada Tahun 2008-2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013-2015 maka jumlah masyarakat miskin di pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi semakin meningkat. Disaat yang bersamaan juga meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota. Namun karena akses terhadap air minum dan sanitasi belum merata, maka Pamsimas tahap III dilanjutkan mulai tahun 2016-2019 khusus untuk desa-desa di kabupaten. Adapun pelaksanaan program Pamsima III bertujuan untuk mendukung agenda nasional dalam rangka peningkatan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Target cakupan yang ingin dicapai Pamsimas adalah: a) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100%

akses sanitasi, dan b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (<http://new.pamsimas.org/>).

Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mendukung upaya tersebut, Program Pamsimas hadir dan terlibat dengan menyediakan dukungan finansial baik berupa investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Untuk meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi secara maksimal, pelaksanaan Program Pamsimas menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut diharapkan proses pemberdayaan masyarakat semakin meningkat. Pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah (<http://new.pamsimas.org/>),

Adapun ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima

komponen program, yakni:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa.
- b. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
- c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum.
- d. Hibah Insentif.
- e. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Dalam rangka mempercepat pencapaian akses universal terhadap air minum dan sanitasi di tahun 2019, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai komponen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan pemerintah desa dan masyarakat, termasuk juga donatur dan swasta (CSR). Pamsimas menjadi program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini sangat diperlukan, yang merupakan dasar atau landasan yang cukup kuat bagi pengembangan kerangka teoritik beserta hasil-hasilnya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Rasika Istahara Windriyaningrum, Hartuti Purnaweni, Kismartini. Penelitian ini berjudul: “Evaluasi Dampak Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial yang

dirasakan oleh masyarakat setelah program WSLIC-3 atau PAMSIMAS yang diterapkan adalah semakin banyak orang merasa lebih nyaman dan mudah untuk mengakses air bersih dan sanitasi, meningkatkan kesadaran diri anak-anak sejak dini untuk memiliki kesehatan yang bersih dan sehat. Perilaku yang didukung oleh fasilitas sanitasi di sekolah, serta peningkatan perilaku yang higienis dan sehat, meskipun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh orang. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat yang masih bergantung pada bantuan pemerintah, kendala ekonomi, dan kelalaian operator.

2. Radiksa Arvian Sitranata, Slamet Santoso. Penelitian ini berjudul: “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Tembalang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pamsimas di Kecamatan Tembalang sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi. Tetapi masih ditemui kekurangan, seperti kurang meratanya pembangunan tower air dan perpipaan Pamsimas, selain tidak merata masih banyak warga miskin yang masih belum dapat mendapatkan Pamsimas.
3. Fitri Afrilya, Atik Rahmawati (2014). Penelitian ini berjudul: “Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang dibuktikan dengan adanya ketersediaan air minum yang bersih secara berkelanjutan dengan pemantauan rutin pada kualitas air dan pemeliharaan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum PMA (Penangkap Mata Air).

Peningkatan kualitas bukan hanya secara fisik namun dari segi pemberdayaan, masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan desa terutama dalam bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

4. Anindya Meithasari, Ari Subowo. Penelitian ini berjudul: “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program Pamsimas di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, ada perubahan PHBS di masyarakat, meskipun program PAMSIMAS masih memiliki peran yang minimal. Peran PAMSIMAS dalam meningkatkan PHBS hanya sampai tahap sosialisasi. Sementara perubahan kondisi lingkungan, masih memiliki kekurangan dalam hal partisipasi masyarakat, institusi lokal dan komitmen pemerintah yang mempengaruhi program PAMSIMAS di desa Kebongulo.
5. Nurhidayati Amelia. Penelitian ini berjudul: “Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Lubuk telah berjalan sesuai dengan peraturan dan rencana yang ada. Dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat sangat antusias untuk berkontribusi dalam proses pemberdayaan.
6. Eka Tri Wahyuni (2014). Penelitian ini berjudul: “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Tahun 2014 (Studi Pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)”. Desa Tarokan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu kurang lebih 5.352 kepala keluarga (KK) atau sekitar 13.980 Jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada, jumlah penduduk yang telah menggunakan sumber air minum layak sampai dengan saat ini adalah 1.100 kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 3.500 jiwa dan jumlah penduduk yang telah menggunakan jamban sampai saat ini adalah sekitar 5.050 kepala keluarga (KK) atau sekitar 12.413 jiwa. Pelayanan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan secara efektif sangat dibutuhkan di Desa Tarokan. Untuk menilai keberhasilan sebuah program maka perlu untuk diketahui dan dianalisis bagaimana *output*, *outcome* dari program tersebut, dan dampak yang di timbulkan dari program tersebut maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah evaluasi program.

7. Admaja (2010), Dampak Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Kebutuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun 2008), Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak yang terjadi untuk menanggulangi permasalahan air bersih dan sanitasi di desa sasaran Program Pamsimas tahun 2008 terlihat dari cakupan total masyarakat yang mampu mengakses sarana air bersih setelah atau pasca program Pamsimas dan perubahan yang terjadi di masyarakat dalam menggunakan sarana sanitasi yang sesuai dengan kriteria sarana sanitasi sehat atau tangga sanitasi.

8. Praptiwi (2011), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Dalam Mengubah Perilaku Masyarakat Dalam Rangka Penurunan Diare di Kabupaten Temanggung (Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak dan Desa Tepusen Kecamatan Kaloran). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penyediaan sarana air bersih, sarana sanitasi dan pengetahuan penduduk dengan perilaku dan kejadian diare pada masyarakat dan tidak ada hubungan antara pendidikan dan penghasilan sebagai karakteristik penduduk terhadap perilaku dan kejadian diare.

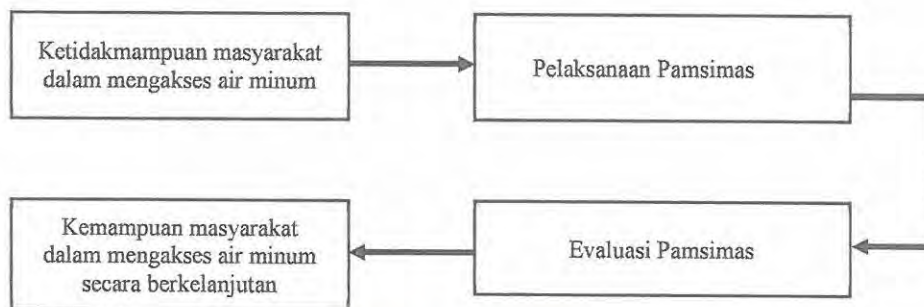
C. Kerangka Berpikir

Pemikiran awal yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah kebutuhan akan air minum yang menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional pada saat ini. Penyediaan air minum bagi masyarakat adalah komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik bagi rakyatnya. Pamsimas sebagai salah satu program pemerintah, mengimplementasikan tanggung jawab programnya melalui penyediaan air minumberbasismasyarakat dimana salah satu lokasi sasarannya yaitu di Kabupaten Manokwari. Program penyediaan air minum tersebut bertujuan untuk memberikan akses air minum kepada seluruh masyarakat sekaligus mengubah pola hidup masyarakat dalam mengakses air minum di Kabupaten Manokwari.

Dari uraian di atas, maka peneliti membuat gambaran mengenai mekanisme penyediaan air minum di Kabupaten Manokwari, serta dilakukan kajian sampai sejauh mana mekanisme yang dilaksanakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses air minum.

Seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

D. Operasionalisasi Konsep

1. Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan sebuah proses pengumpulan data secara sistematis, terencana dengan menggunakan metode dan alat ukur yang sesuai untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan, efektifitas atau kecocokan suatu program apakah sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasari atas perbandingan terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar yang telah dibakukan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah alternatif pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*community based development*). Artinya pembangunan berawal dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dimanfaatkan untuk masyarakat.

3. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Terkait permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka pendekatan penelitian yang lebih tepat adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus. Hal ini mengandung pemahaman bahwa penelitian difokuskan pada fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Konsentrasi peneliti pada bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Monokwari dalam melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).

Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan, dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat *emergent* atau berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan (Nazir, 2014). Desain yang berubah tersebut bersifat sikuler karena penentuan sampel yang bersifat *purposive*, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan langkah yang bersifat interaktif bukan terpisah-pisah. Penelitian kualitatif melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau juga bisa bermasalah.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber informasi adalah sumber-sumber yang daripadanya peneliti mendapatkan informasi atau data. Dalam penelitian kualitatif, yang dijadikan sampel (informan) adalah sumber yang dapat memberikan informasi sampel berupa

peristiwa, manusia, hal, dan situasi yang diobservasi peneliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, apa adanya, dan terungkap secara kasat mata. Perihal sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan situasi benda-benda lainnya.

Merujuk pada masalah dan fokus dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data, yakni: pertama, **Informan Kunci**. Sangatlah penting dalam kaitan dengan permasalahan penelitian. Pencarian dan penemuan informan kunci secara benar dapat digunakan untuk membangun teori informan lainnya. Informan awal akan selanjutnya menunjukkan orang lain untuk dapat memberikan informasi selanjutnya, dan selanjutnya informan ini diminta pula untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi selanjutnya. Demikian cara memperoleh informasi atau data yang dilakukan oleh peneliti. Cara perolehan data yang dilakukan secara berulang-ulang ini lazimnya disebut "*snowball sampling*".

Kedua, **Peristiwa**. Sumber data lain yang perlu didapat peneliti adalah berupa peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan masalah. Peristiwa-peristiwa yang oleh peneliti diobservasi di lokasi penelitian melalui wawancara, seperti tingkah laku berupa gerak-gerik dan mimik informan saat diwawancarai. Semuanya didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dianalisis dan dituangkan dalam hasil penelitian.

Ketiga, **Dokumen**. Dokumen yang dimaksud peneliti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian seperti dokumen rancangan program, laporan hasil evaluasi program, tindak lanjut hasil evaluasi, naskah hasil evaluasi, program kerja, internal control *questionnaire*, dokumen tentang uraian tugas, rencana kerja dan foto-foto pemeriksaan fisik di lapangan.

C. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait objek formal penelitian dan metode kualitatif, peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti adalah instrumen utama, selain observasi dan wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Ada tiga tahap pengumpulan data yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya, yakni tahap awal memasuki lokasi penelitian (*getting in*), tahap keberadaan peneliti di lokasi penelitian (*getting along*), dan tahap pengumpulan data. Apa sesungguhnya yang dilakukan peneliti dengan tahap-tahap ini?

Pertama, tahap awal memasuki lokasi penelitian (*getting in*). Tahap ini mengingatkan dan menegaskan peneliti secara gamblang akan keberadaannya sendiri. Bahwasanya peneliti memandang dan memposisikan diri sebagai instrumen utama. Sebagai instrumen utama, peneliti memandang dirinya sebagai subyek rasional penelitian. Artinya peneliti melibatkan diri sepenuhnya sebagai subjek rasional dalam mana data dikumpulkan melalui pengamatan, penyelidikan, pelacakan, pengeksplorasian, pemahaman, pengoreksian, penilaian, pengabstraksian, dan penginterpretasian. Demikian peneliti akan menampilkan totalitas dirinya sebagai instrumen utama yang tidak dapat tergantikan atau terwakilkan. Peneliti akan meringkas, mengklasifikasi, mengoreksi data, dan

mengeksplorasi hal-hal yang unik dan tidak lazim untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Itulah sebabnya sebelum memasuki lokasi penelitian, peneliti melapor dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat izin penelitian atau bukti lain yang sah perihal keberadaan peneliti kepada pihak-pihak terkait kewenangan pengelola dan pengguna anggaran, dan pengawasan anggaran. Keberadaan peneliti secara formal ini membuktikan bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian.

Pada tahap awal memasuki lokasi penelitian, peneliti menyatakan telah mengenal lokasi penelitian, kondisi fisik, kondisi sosial budaya dan politik yang ada, baik melalui observasi langsung maupun tidak langsung. Karena itu adalah optimisme rasional bagi peneliti bahwa pengalaman empiris-rasional ini memudahkan dan memperlancar peneliti dalam proses pengumpulan data. Peneliti tentu akan tetap menjaga tata krama dan sopan santun dalam penelitian.

Kedua, tahap keberadaan peneliti di lokasi penelitian (*getting along*). Tatkala berada di lokasi penelitian, peneliti berusaha menjalin hubungan pribadi baik dan akrab dengan para informan dan mencari informasi yang lengkap terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada waktu yang sama peneliti berupaya menangkap intisari, makna dari berbagai informasi dan pengamatan yang diperoleh.

Peneliti pada saat itu menyadari diri sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, penganalisis, penginterpretasi data. Peneliti berupaya memaknai semua informasi atau data yang diperoleh untuk kemudian menjadi data hasil penelitian. Itulah sebabnya sebagai subjek penelitian, peneliti membawa diri dan menempatkan dirinya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Keterjalinan hubungan baik antara peneliti dengan subjek-subjek lain yang diteliti selama atau sesudah memasuki lokasi penelitian merupakan kunci utama keberhasilan pengumpulan data. Kemampuan menjalani hubungan baik ini (*association power*) adalah sarana yang baik agar benar-benar ada kepercayaan dan saling pengertian antara peneliti dengan responden atau informan. Ini sangat membantu terciptanya keterbukaan bagi informan dalam memberikan informasi sebanyak mungkin sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh peneliti dengan mudah dan lengkap. Peneliti selalu berupaya memperhatikan tata krama dan kaidah budaya setempat dalam berdialog, dan menghindari kesan yang merugikan informan dan menghargai apa saja yang dikemukakan informan. Keberadaan peneliti secara terbuka dan diakui secara formal di lapangan akan memudahkan subjek yang diteliti percaya dan diharapkan dapat membantu memberikan data yang relevan, yang diperlukan oleh peneliti.

Ketiga, tahap pengumpulan data (*logging data*). Pada bagian ini, tiga teknik pengumpulan data akan digunakan peneliti untuk membantu mengumpulkan data secara *holistic-integral*, relevan, dan terfokus pun yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian atau penulisan ini. Tiga teknik termaksud yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni : Observasi, dimana peneliti mengamati kondisi fisik, fasilitas dan situasi sosial instansi penelitian. Teknik Wawancara Mendalam juga digunakan, dimana peneliti memulai proses wawancara mendalam sejak bulan Maret 2018. Teknik ini dilakukan secara mendalam terhadap informan-informan pada jam dinas (jam kantor) dari pagi sampai siang hari. Ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara akurat untuk menjawab masalah penelitian. Dalam proses wawancara peneliti akan menggunakan

alat rekaman, handycam, dan buku tulis. Setiap data pada saat diwawancara langsung direkam dan dicatat untuk pada gilirannya dideskripsikan dan dipilah-pilah atau katagorikan untuk kemudian memudahkan proses analisa. Dengan teknik wawancara, peneliti bermaksud untuk mendapatkan data-data perihal pelaksanaan program PAMSIMAS, peran pemerintah Kabupaten Manokwari, pemberdayaan masyarakat, pengawasan efektif, pembiayaan, dan faktor-faktor pengaruh.

Keempat, teknik Dokumentasi, di mana peneliti akan mengumpulkan data, baik dari sumber-sumber yang ada pada instansi maupun di luar instansi, Dokumen-dokumen itu adalah baik berupa catatan-catatan dan surat-surat yang berkaitan dengan peran pemerintah kabupaten Manokwari, pelaksanaan program dan evaluasi program, dan proses pemberdayaan masyarakat.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara lebih terang komponen-komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data

1. Reduksi Data

Data empiris yang akan diperoleh peneliti dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian yang lengkap dan terinci. Dengan catatan lapangan tersebut peneliti memilah-milah atau mengkatagorikan yang mana data yang cocok atau tidak cocok dengan masalah dan focus penelitian. Data yang tidak cocok dibuang atau direduksi.

2. Penyajian Data

Dengan penyajian data atau *display* data, peneliti akan melihat gambar secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel, gambar, audio visual, dan uraian naratif.

3. Kesimpulan dan Saran

Penarikan kesimpulan, bagi peneliti, bukanlah term yang terpisah dan berdiri sendiri. Kesimpulan hanya dapat dilakukan dalam hubungan dengan data-data yang sudah diverifikasi dan dimengerti secara baik. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Itu berarti sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti akan berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Peneliti akan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan menuangkannya dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dan proses selanjutnya adalah ketika data sudah dianggap *credible* melalui proses verifikasi secara terus-menerus barulah peneliti membuat penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Manokwari yang merupakan ibukota Provinsi Papua Barat dan merupakan kota administrasi tertua di wilayah utara Papua memiliki luas wilayah 4.650,32 kilometer persegi dengan wilayah terluas Distrik Masni seluas 1.406,10 kilometer persegi dan wilayah terkecil Distrik Manokwari Timur dengan luas 154,84 kilometer persegi. Secara administratif, Kabupaten Manokwari dibagi menjadi 9 distrik, 166 kampung dan 7 kelurahan.

1. Administratif

Secara geografis Kabupaten Manokwari terletak diantara kepala burung Pulau Papua pada posisi di bawah garis khatulistiwa antara $132^{\circ}35'$ - $134^{\circ}45'$ Bujur Timur, dan $0^{\circ}15'$ - $3^{\circ}25'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Samudera Pasifik
- Sebelah Timur : Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Teluk Bintuni
- Sebelah Barat : Kabupaten Tambrau

Kabupaten Manokwari terletak dalam beberapa ketinggian sebagai berikut:

- 0-100 meter, di atas permukaan laut; merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada di ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Distrik Manokwari, Distrik Masni.

- 100-1000 meter di atas permukaan laut, meliputi hampir semua distrik di bagian tengah-utara, Tengah-Timur, dan Tengah Selatan.
- Lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut meliputi seluruh wilayah Kabupaten Manokwari yang merupakan daerah dataran tinggi pegunungan yang hampir mendominasi sebagian besar wilayah di Kabupaten Manokwari.

Kondisi Geologi terdiri dari batuan sedimen Pratersier berupa batuan sedimen klastik, karbonat, Plutonik (Granit), batuan Vulkanik berupa Lava, aglomerat, breksi, tufa dan lahar serta batuan metamorfik. Batuan Sedimen tersier terdiri dari batuan sedimen klastik, vulkanik dan karbonat. Batuan Kwartir terdiri endapan pantai, endapan sungai, endapan limpas banjir. Endapan sedimen dengan umur Kwartir hanya muncul di beberapa tempat, sedang endapan sedimen Resen (Qa) hanya mengisi lembah-lembah muda di mana saat ini sungai besar dan anak sungainya mengalir.

Jenis tanah di Kabupaten Manokwari terdiri dari tanah alluvial (18,70%), tanah mediterania (2,44%), tanah podsolid merah kuning (10,41%), pospodid coklat keabuan (7,57%), tanah utama atau complex of soil (49,21%), tanah latosol (4,49%) dan tanah organosol (7,17). Kedalaman efektif tanah di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari adalah rata-rata di atas 25 cm, kecuali wilayah-wilayah pegunungan kapur.

Kemiringan lahan di Kabupaten Manokwari bervariasi mulai dari lahan datar (0-2%), landai (2-40%) dan terjal (lebih dari 40%). Lahan datar yang ada di Kabupaten Manokwari adalah 40% dari luas lahan yang ada, lahan dengan kategori landai seluas 50% dari luas wilayah Kabupaten Manokwari dan sisanya adalah

lahan terjal. Gambaran kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Manokwari yang terbagi kedalam 2 (dua) tipologi wilayah yaitu pesisir dan pegunungan.

Manokwari memiliki beberapa sungai, danau dan gunung yang tersebar di beberapa wilayah. Sungai terpanjang adalah sungai Wariori yaitu sepanjang 96 km², Danau Kabori dengan luas 10 Ha dan Gunung Umsini dengan tinggi 2.950 mdpl.

2. Demografi

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu wilayah dengan penduduk terbesar di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 150.179 jiwa dengan jumlah laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 79.766 jiwa dan 70.413 jiwa. Dengan komposisi seks rasio penduduk Kabupaten Manokwari adalah 113,28.

Jumlah penduduk tersebut tersebar menurut masing-masing Distrik, dengan jumlah distrik sebanyak 9 buah pada 166 kampung dan 7 kelurahan. Distrik Manokwari Barat yang merupakan ibu kota Kabupaten Manokwari memiliki penduduk terpadat dengan penduduk 85.700 jiwa atau sekitar 57 % dari total penduduk, dengan kepadatan 361,24 jiwa / km². Sebagai distrik yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa dan industri di Kabupaten Manokwari, tentunya akan menjadi daya tarik bagi para imigran untuk tinggal dan menetap di distrik ini. Distrik ke dua dengan penduduk terpadat adalah Distrik Prafi dengan penduduk 14.405 jiwa atau sekitar 9,6 % dari total penduduk dengan tingkat kepadatan mencapai 36,20 jiwa/km². Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari pada tahun 2013 hanya mencapai 32,29 jiwa/km².

3. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Manokwari, seperti halnya dengan beberapa kabupaten/kota di Pulau Papua secara sosial budaya terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Suku asli yang mendiami Kabupaten Manokwari adalah suku besar Arfak, suku Wamesa, suku Samuri, Sebyar, Irarutu dan Numfor Doreri. Selain itu terdapat suku pendatang asal Papua seperti Serui, Biak, Waropen serta beberapa suku dari luar Papua.

Manokwari juga disebut sebagai Kota Injil karena pada tanggal 5 Februari 1855, kedua penginjil dari Eropa, C.W. Ottow dan J.G. Gleissler mengawali misi penginjilannya dengan mendaratkan kakinya di pulau mansinam (Teluk Doreri). Dari Mansinam Manokwari inilah kemudian berita Injil tersebut diberitakan keseluruh daratan Papua. Dan berdasarkan sejarah pekabaran Injil tersebut , maka manokwari merupakan kota pertama masuknya Injil di Papua.

4. Air Bersih, Air Limbah, dan Persampahan

Sistem pelayanan air bersih di Kabupaten Manokwari belum memadai. Selain karena akses perpipaan yang terbatas kualitas air yang diperoleh dari sumur bor atau penampungan air hujan tidak dapat dikonsumsi langsung untuk air minum. Pemanfaatan air bersih untuk mandi dan mencuci sebagian besar menggunakan sumur bor/pompa untuk daerah perkotaan sementara daerah perkampungan memanfaatkan air hujan, mata air dan air sungai.

Selanjutnya untuk akses air layak minum penduduk Kabupaten Manokwari memanfaatkan air isi ulang yang merupakan proporsi terbesar. Sementara hanya

sebagian yang memanfaatkan mata air terlindungi serta yang memakai jasa PDAM sangatlah kecil ditambah lagi sering tidak mengalirnya air.

5. Kelembagaan Pemerintah Daerah di Bidang Air Minum dan Sanitasi

Air minum dan sanitasi adalah salah satu sektor yang harus diperhatikan dalam pembangunan demikian halnya dengan Kabupaten Manowari. Pengelolaan air minum dan sanitasi yang tepat dapat menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat. Namun jika sektor air minum dan sanitasi tidak diperhatikan dalam pembangunan maka akan menciptakan berbagai permasalahan kesehatan dan lingkungan seperti munculnya kawasan kumuh dan menjangkitnya beragam penyakit akibat lingkungan yang kotor. Untuk menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari di bidang air minum dan sanitasi maka dibentuklah satuan kerja yang mengurus air minum dan sanitasi yang terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

B. Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Manokwari

Evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni evaluasi program dan evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi program dilakukan apabila yang menjadi bahan pertimbangan adalah evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh sistem, masalah dan prosedur, atau hanya bagian dari sistem tersebut. Sedangkan evaluasi dampak kebijakan mencakup dampak pada situasi atau kelompok target, dampak pada situasi atau kelompok non-target, dampak pada waktu mendatang dan sekarang, serta biaya-biaya langsung dan tidak langsung. Hal-hal ini akan menjelaskan pertanyaan-

pertanyaan Casely dan Kumar (1987) dalam suatu evaluasi:

1. Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek ?
2. Bagaiman mereka bereaksi terhadap proyek tersebut ?
3. Bagaiman proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka ?

Evaluasi program bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaiman program-program mereka berlangsung, serta menunjukkan faktor-faktor yang dapat dimanipulasi supaya dapat memperoleh hasil yang lebih baik, yang pada gilirannya akan memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain. Menurut Donal F Heider, penilaian evaluasi juga dapat diarahkan untuk berbagai macam tujuan, tidak hanya sebagai alat untuk memperbaiki program-program, kadang evaluasi dilakukan untuk mendukung suatu program yang sedang berjalan, dan terkadang untuk meneliti agar program tersebut terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan pengurangan aktifitasnya.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Manokwari dan faktor apa saja yang menentukan keberhasilan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka digunakan tipe evaluasi kebijakan dari sudut pandang efektivitas, yang menilai “apakah tujuan dari kebijakan Penyediaan Air dan Sanitasi, bisa tercapai melalui Program Pamsimas”. Sedangkan evaluasi programnya menggunakan Tipe Evaluasi Proses yang menganalisis bagaimana proses untuk mencapai tujuan akhir Program Pamsimas dengan tiga komponen programnya, yakni : (1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; (2) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

dan pelayanan sanitasi; (3) penyediaan sarana air minum dan sanitasi. Sehingga analisisnya, apakah dari ketiga komponen tersebut telah terpenuhi untuk mencapai tujuan akhir Program Pamsimas.

Kriteria yang dipilih karena dianggap penting untuk dijawab pada Evaluasi Program Pamsimas di Kabupaten Manokwari adalah : Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan tercapai?; Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?; Kecukupan, yakni seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?; Pemerataan yakni apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?; Ketepatan, yaitu apakah hasil yang diinginkan benar-benar bernilai?; dan Responsivitas, yaitu apakah hasil telah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?.

Dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari, diperoleh hasil seperti berikut:

1. Efektifitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkaitan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya (Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, 2003). Kriteria efektivitas hasil penelitian menerangkan bahwa hasil yang diinginkan belum dicapai, terbukti dengan belum seluruhnya masyarakat dapat mengakses air minum langsung dirumah. Pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Manokwari masih belum memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini dilihat dari target

dan capaian penerima program Pamsimas belum memenuhi target dari target yang sudah ditentukan sebelumnya. Pamsimas di Kabupaten Manokwari menargetkan 166 kampung yang akan memperoleh pelayanan air minum. Target Paamsimas secara nasional tahun 2019 adalah seluruh kampung terlayani dalam akses air minum. Sehingga tahun 2019 Kabupaten Manokwari juga harus sudah menyelesaikan kegiatan air minum untuk seluruh kampung, akan tetapi hal ini akan sulit terwujud sebab dari 166 kampung baru 69 kampung yang telah difasilitasi Pamsimas. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Kabupaten Manokwari bila ingin mewujudkan target nasional maka harus memfasilitasi air minum di 97 kampung.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, 2003). Hasil penelitian menjelaskan jika kriteria efisiensi pada Pamsimas Kabupaten Manokwari belum maksimal, sekalipun telah dilakukan penguatan teknis pendampingan melalui pelatihan kepada fasilitator masyarakat dan juga telah dilakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat sebagai pengguna sarana air bersih. Bila dilihat dari efisiensi anggaran, penyerapan anggaran sudah cukup. Dengan anggaran yang terbatas Pamsimas tetap menjalankan pembangunan

sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Dengan adanya keterbatasan anggaran juga menuntut penghematan biaya pada saat pembangunan fasilitas. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur air minum di kampung-kampung perlu adanya dukungan anggaran yang cukup. Hal ini dimaksudkan karena kendala serius masalah perolehan air dan pembangunan sarana air minum oleh Pamsimas di Kabupaten Manokwari yang belum memperoleh pelayanan air minum adalah kurangnya dana/anggaran yang tersedia sehingga pembangunan infrastruktur di kampung-kampung tersebut dilakukan secara bertahap (kampung per kampung).

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn (2003) mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah” (Dunn, 2003). Pamsimas yang telah dilaksanakan di Kabupaten Manokwari secara jumlah kampung yang ditargetkan sampai dengan tahun 2017 yaitu 69 kampung seluruhnya berhasil dipasang jaringan air minum oleh Pamsimas, namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan lancar, pencapaian-pencapaian yang dihasilkan belum terlalu maksimal, terbukti dari total 69 kampung yang telah difasilitasi Pamsimas ditemukan 24 kampung yang fasilitas air minumnya tidak dapat lagi digunakan. Hal ini disebabkan sdm fasilitator dan SDM masyarakat sebagai penerima juga belum berkembang seperti yang diharapkan. Selain itu, pelaksana Pamsimas masih sangat kurang dalam memahami dan

melaksanakan apa yang sudah tertulis pada buku pedoman dan buku petunjuk teknis. Buku pedoman yang seharusnya dikuasai oleh pelaksana Pamsimas masih dianggap sebagai sarana formalitas saja, tidak diterapkan secara menyeluruh. Kurangnya sumber daya manusia dalam mengikuti prosedur menyebabkan permasalahan tersendiri.

4. Keadilan

Dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat” (Dunn, 2003). Pemerataan dari segi biaya sudah didistribusikan kepada penerima sesuai aturan yang berlaku di Pamsimas. Namun untuk pemanfaatannya kurang sesuai harapan, disebabkan masyarakat sendiri yang tidak biasa menggunakan fasilitas tersebut serta perawatannya yang sangat kurang. Dari segi pembangunan sarana dan prasarana Pamsimas, seperti saluran pipa air minum, fasilitas sanitasi dan tower sumber air Pamsimas yang digunakan untuk mengaliri perpipaian. Selain pemerataan dalam segi fasilitas, peneliti memfokuskan kriteria pemerataan pada saat penentuan prioritas pemilihan, apakah penentuan pemilihan proyek tersebut tanpa intervensi atau bebas nilai. Hasil penelitian pada kriteria pemerataan ternyata, pendirian titik Pamsimas sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan, meskipun beberapa kali muncul penolakan dari masyarakat mengenai titik yang ditentukan. Sedangkan untuk politik dalam pelaksanaan Pamsimas sering ditemui, biasanya terjadi dalam

rapat prioritas pembangunan tower dan saluran air. Permasalahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik antar warga.

5. Responsivitas

Pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari masih belum sesuai harapan walaupun kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Pamsimas sebenarnya bertujuan sangat baik dan kebijakan yang dikeluarkannya sangat tepat. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003). Hasil penelitian Pamsimas di Kabupaten Manokwari menunjukkan bila Pamsimas dapat mengubah gaya hidup bersih pada masyarakat. Melalui Pamsimas, masyarakat dapat memahami berapa pentingnya gaya hidup bersih, yang telah disosialisasikan Pamsimas melalui program-programnya seperti kebiasaan cuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan kebiasaan BABS. Namun dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh program Pamsimas, masih terdapat respon negatif dari masyarakat berkaitan dengan sarana dan kerusakan fasilitas yang terjadi. Bila melihat dari segi kriteria responsivitas pelaksanaan Pamsimas dapat dikatakan belum tercapai seluruhnya meskipun Pamsimas sudah dapat dikatakan berhasil dalam mengubah gaya hidup bersih warga Kabupaten Manokwari. Namun kondisi lapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak kekurangan dari segi fasilitas dinilai belum dapat memuaskan kebutuhan kelompok masyarakat.

6. Ketepatan

Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif yang akan dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003). Hasil Pamsimas benar-benar berguna bagi masyarakat disebabkan kebutuhan akan air minum memang merupakan kebutuhan utama masyarakat, namun pemeliharaan hasil dari Pamsimas tersebut yang sangat kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang belum terjamah Pamsimas, padahal seharusnya mendapatkan bantuan air bersih dan sanitasi. Kejadian ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kondisi geografis yang ada di masing-masing daerah kadang tidak mendukung sehingga tidak dapat mencapai daerah-daerah tertentu. Kriteria ketepatan masih dikatakan belum optimal, masih saja banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi malah belum mendapatkan fasilitas dari Pamsimas sama sekali.

Sementara itu Bryant and White (1987) merumuskan empat kendala dalam melakukan penelitian evaluasi :

1. Evaluasi menjadi suatu ancaman karena mudah digunakan sebagai sarana mengkritik orang lain atau mengungguli kekuasaan lain.
2. Kendala ekonomis, bahwa ekonomi yang baik itu mahal dari segi waktu dan uang, dan supaya tersedia banyak data tidak selalu sepadan dengan tingginya biaya tersebut.

3. Kendala teknis dimana penanganan data sering menuntut adanya staf yang terlatih dan tersedianya kemampuan pengolahan data, termasuk waktu suatu fakta.
4. Kendala politis, bahwa hasil-hasil evaluasi mungkin bukan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, tetapi juga secara politis memalukan jika diungkapkan. Seharusnya evaluasi dipandang sebagai bagian dari proyek, bukan mengidentifikasi diri dengan kebijakan atau rancangan proyek tertentu, sehingga evaluasi menjadi bagian dari suatu proses belajar yang sedang berlangsung dan bukan sebagai suatu ancaman.

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari mengalami banyak kendala, seperti : minimnya SDM yang potensial, tingkat ekonomi masyarakat yang tidak sesuai dengan biaya yang dibutuhkan, munculnya respon yang kurang baik dari masyarakat serta terdapat masalah - masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Semua kendala tersebut menjadi alasan program Pamsima tidak berjalan sesuai harapan.

Agar Keberhasilan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari dapat berhasil diperlukan:

1. Adanya kesesuaian antara kebutuhan masyarakat sebagai penerima program dan hasil-hasil dari pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Manokwari sungguh-sungguh membutuhkan air minum dan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh Pamsimas. Program tersebut dapat membantu masyarakat tersebut memperoleh air bersih yang menjadi kebutuhan mereka.

2. Adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan organisasi dan pelaksana dalam mengelola organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan pelaksanaan program tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh organisasi Pamsimas Kabupaten Manokwari, disebabkan SDM fasilitator yang masih rendah dan juga dipengaruhi SDM masyarakat sendiri yang banyak terpengaruh budaya-budaya yang pada akhirnya menghambat penyelenggaraan Pamsimas
3. Adanya kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal pengambilan keputusan di Pamsimas Manokwari masih banyak tergantung pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah Kabupaten Manokwari, (sebagai contoh dalam menetapkan kampung sasaran yang dilakukan Pamsimas Kabupaten Manokwari hanya mengusulkan daftar kampung calon sasaran Pamsimas namun yang menentukan kampung-kampung terpilih dari daftar nama tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagi calon kampung sasaran yang menerima bantuan dari sumber dana APBN sedangkan calon kampung sasaran penerima bantuan yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari), hal ini menyebabkan kampung yang menerima fasilitasi Pamsimas tidak berdasarkan urutan kampung prioritas namun hanya pemilihan acak.

C. Faktor-faktor penentu keberhasilan Program PAMSIMAS di Kabupaten Manokwari

Keberhasilan program Pamsimas ditentukan oleh berbagai hal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Manokwari adalah:

1. Orientasi pemberdayaan harus didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat yang akan memperoleh program Pamsimas. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk menjadi mandiri. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak terlalu tampak.
2. Pola pikir masyarakat dapat berdampak secara luas pada masyarakat itu sendiri. Pola pikir yang terbuka membuat masyarakat dapat menerima masukan dari luar. Pola pikir juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan masyarakat. Dengan adanya program PAMSIMAS memberikan bantuan berupa air bersih dan juga mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan (sanitasi). Pola pikir akan mempengaruhi budaya yang ada di masyarakat. Masyarakat tidak akan maju bila masih tergantung pada bantuan pemerintah. Masyarakat yang menganggap bahwa jamban itu mahal akan BAB sembarangan dan berharap pemerintah perlu memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka tidak akan bisa maju. Padahal setelah mendapat penyuluhan sanitasi dari Program

PAMSIMAS diharapkan kesadaran masyarakat akan tumbuh dan pola pikirnya berubah untuk tidak tergantung dengan pemerintah dan mandiri untuk memiliki jamban.

3. Budaya gotong royong dan kerja sama yang dimiliki masyarakat Kabupaten Manokwari merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan termasuk besaran dana kontribusi masyarakat.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air dan sanitasi, mengingat masih banyaknya masyarakat Kabupaten Manokwari yang kesulitan untuk memperoleh air bersih dan keinginan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sehingga jumlah masyarakat yang menderita muntaber, diare dan gatal-gatal dapat berkurang.

Adapun faktor penentu keberhasilan program Pamsimas di Kabupaten Manokwari adalah:

1. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia dan sumber daya dana. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan program Pamsimas kepada masyarakat Kabupaten Manokwari. Kurangnya kinerja Pamsimas juga dapat disebabkan oleh SDM yang kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM Pamsimas sangat kurang baik secara kuantitas dan kualitas. Kurangnya SDM ini mempengaruhi keberhasilan program, karena SDM lah yang menangani dari

awal sampai akhir program Pamsimas. Sedangkan sumber daya dana yang disediakan di Kabupaten Manokwari sangat terbatas, dan karena kurangnya anggaran sangat berpengaruh terhadap fasilitas dan sarana yang akan disediakan untuk masyarakat. Kewenangan juga mempengaruhi keberhasilan program, banyaknya Perangkat Daerah yang menangani Pamsimas terkadang menimbulkan kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya koordinasi tersebut sudah pasti akan mempengaruhi sebuah kebijakan.

2. Kelembagaan

Dari hasil penelitian menunjukkan kekurangan disektor kelembagaan yang secara langsung mengurangi kinerja program. Hal ini berdampak pada keberhasilan atau kegagalan program. Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja pelaksana Pamsimas merupakan bentuk usaha untuk mencapai keberhasilan program dari faktor lembaga. peneliti memandang peran sebuah lembaga dalam Pamsimas sangat penting. Banyaknya pelaksana Pamsimas yang ikut bertanggung jawab membuat faktor lembaga juga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Pengaruh faktor kelembagaan dalam Pamsimas sangatlah tinggi, tetapi hasilnya sangat belum cukup baik, hal ini dikarenakan banyak pihak yang terkait dengan Pamsimas. Lembaga tersebut belum berfungsi sepenuhnya seperti yang telah ditetapkan. menyadari pentingnya sebuah lembaga, pemerintah harus segera membuat langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja lembaga yang ada di Pamsimas.

3. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Buku pedoman dan buku petunjuk teknis yang diadakan juga sudah meliputi dimensi kejelasan. Buku pedoman ditujukan untuk mengatur segala sesuatunya baik yang bersifat umum dan teknis operasional, diharapkan dengan adanya buku pedoman dapat mengurangi kesalahan interpretasi dari pelaksana Pamsimas. Kesimpulan dari faktor komunikasi mempengaruhi Pamsimas yaitu, komunikasi telah diterapkan secara baik, tetapi melihat dari faktor lain seperti sumber daya membuat komunikasi yang telah baik dilakukan menjadi kurang, yang mana hal ini mengurangi performa kinerja Pamsimas.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis studi yang telah dilakukan pada BAB empat terkait Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Manokwari, selanjutnya diperoleh kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian biaya kepada penerima bantuan sudah sesuai aturan yang berlaku di Pamsimas, namun untuk pemanfaatannya masih kurang sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat sendiri yang tidak biasa menggunakan fasilitas yang telah disediakan serta perawatan yang sangat kurang maksimal.
2. Penentu keberhasilan Pamsimas di Kabupaten Manokwari adalah peningkatan SDM Fasilitator Pamsimas dan SDM Masyarakat, yang mana Penguatan teknis pendampingan melalui pelatihan kepada fasilitator masyarakat dan kegiatan pelatihan kepada masyarakat sebagai pengguna sarana air bersih harus dilakukan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil studi yang diperoleh, saran berikut ini dapat dikemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan, masukan untuk pihak pemerintah, pelaksana program Pamsimas dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar turut

terlibat secara bertanggung jawab memperhatikan program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia demi kelancaran pelaksanaan program Pamsimas kepada masyarakat.
2. Memperhatikan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan program PAMSIMAS sehingga hasil kegiatan benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat.
3. Membangun kembali kelembagaan kampung untuk mengelola dan memonitoring sarana pembangunan air minum kampung.
4. Meningkatkan koordinasi, pengawasan, kendali dan evaluasi antara pihak terkait dalam hal ini dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah (DPU, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan) terhadap masukan atau rencana kegiatan yang direncanakan, pelaksanaan program sampai tingkat bawah, dari awal hingga akhirnya program mengingat target dan dampak yang diberikan belum sesuai dengan harapan.



DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2016, Januari 21). Dipetik Mei 07, 2018, dari PAMSIMAS: <http://new.pamsimas.org/>
- Agus, R. (2011). *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Arikunto, S. (1993). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2004). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, cetakan ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S., Jabar, A., & Safrudin, C. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azwar, A. (1996). *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Azwar, A. (1996). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Bina Putra.
- Brinkerhoff, R. o., & dkk. (1983). *Program Evaluasi A Practitioner's Guid For Trainers end Education*. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing.
- Bryant, C., & White, L. G. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Casely, D., & Kumar. (1987). *Project Monitoring and Evaluation in Agriculture*.
- Dunn, W. N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Guskey, T. R. (2000). *Evaluating Profesional Development*. California: Corvin Press Incorporated.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasan, H. (2009). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Huda, N. (2009). *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, F. T. (2008). *Alternatif Mengembangkan masyarakat di Era. Globalisasi, Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1996). Jakarta: Balai Pustaka.
- Karding, A. K. (2008). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri di Kota Semarang*.
- Mantra, I. B. (1997). *Strategi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Depkes RI.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: ALFABETA.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. (1996). *PEMBERDAYAAN : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rutman, L. (1984). *Evaluasi Research Methodolog, 2 ed*. New Delhi: Publishing India PUT. Ltd.

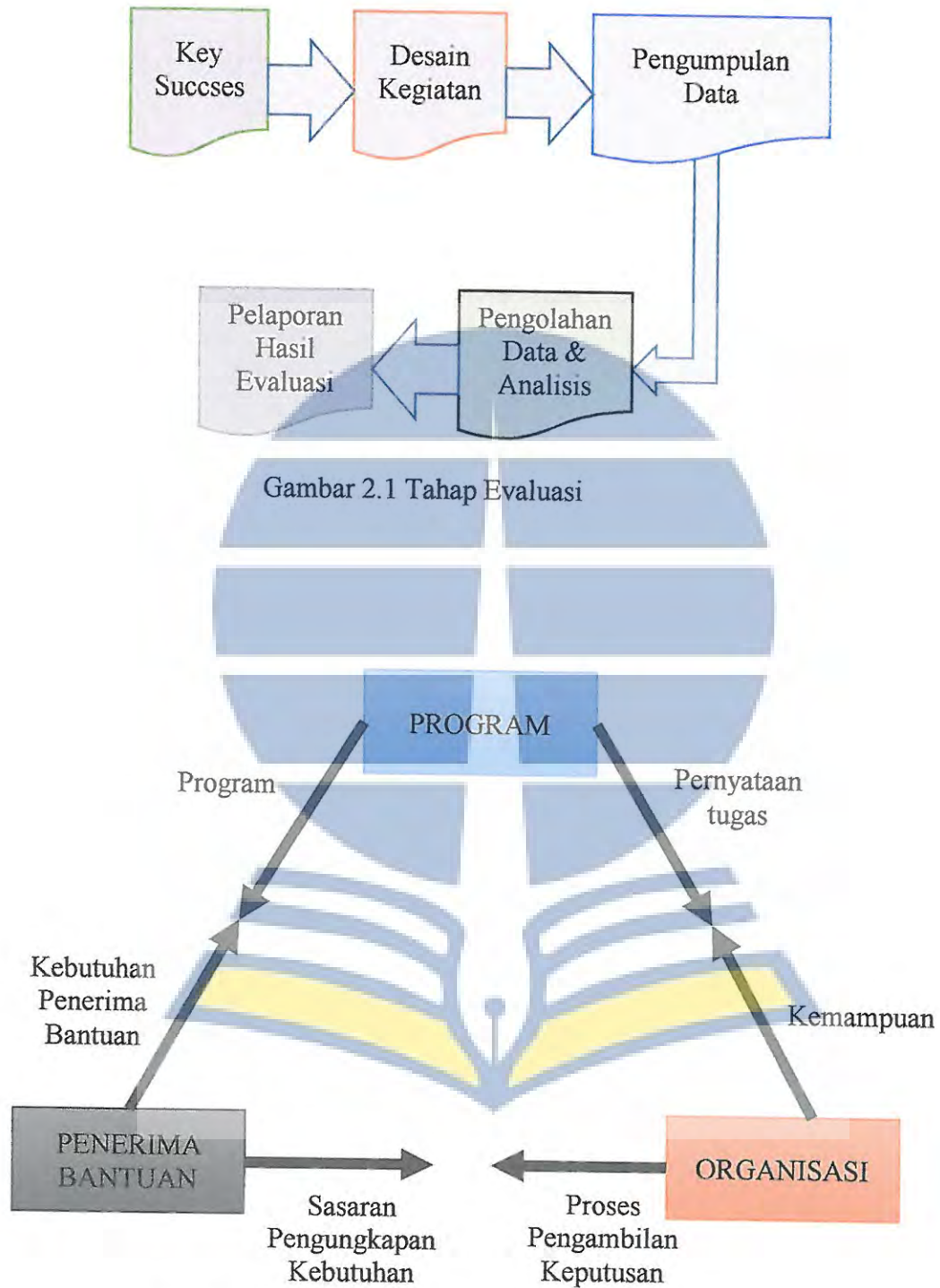
- Sax, G. (1980). *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation (2nd edition)*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Stufflebeam, D. L. (2003, Oktober 03). *The CIPP Model for Evaluation. The article presented at the 2003 annual conference of the Oregon Program Evaluator Network (OPEN)*. Dipetik April 20, 2018, dari <http://www.wmich.edu/evalctr/cippmodel>
- Subari, M. (2005). *Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Y-Pin Indonesia.
- Sudijono, A. (1996). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparman, M. A., & Zulhairi, A. (2004). *Pendidikan Jarak Jauh Teori Dan Praktek*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suprihanto. (1988). *Manajemen Personalita*. Yogyakarta: BPFE.
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa dkk, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

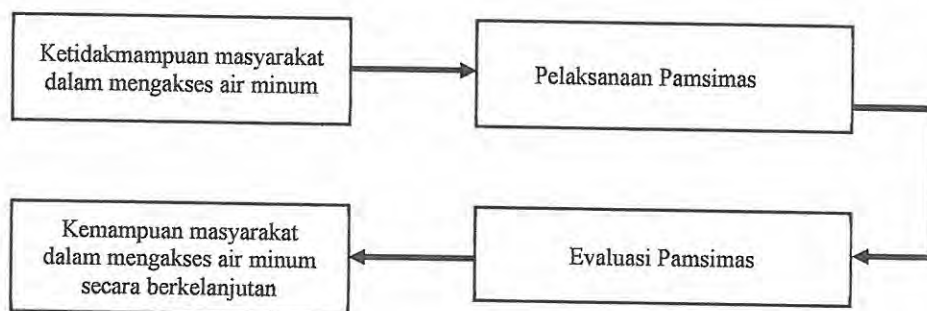
Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok.



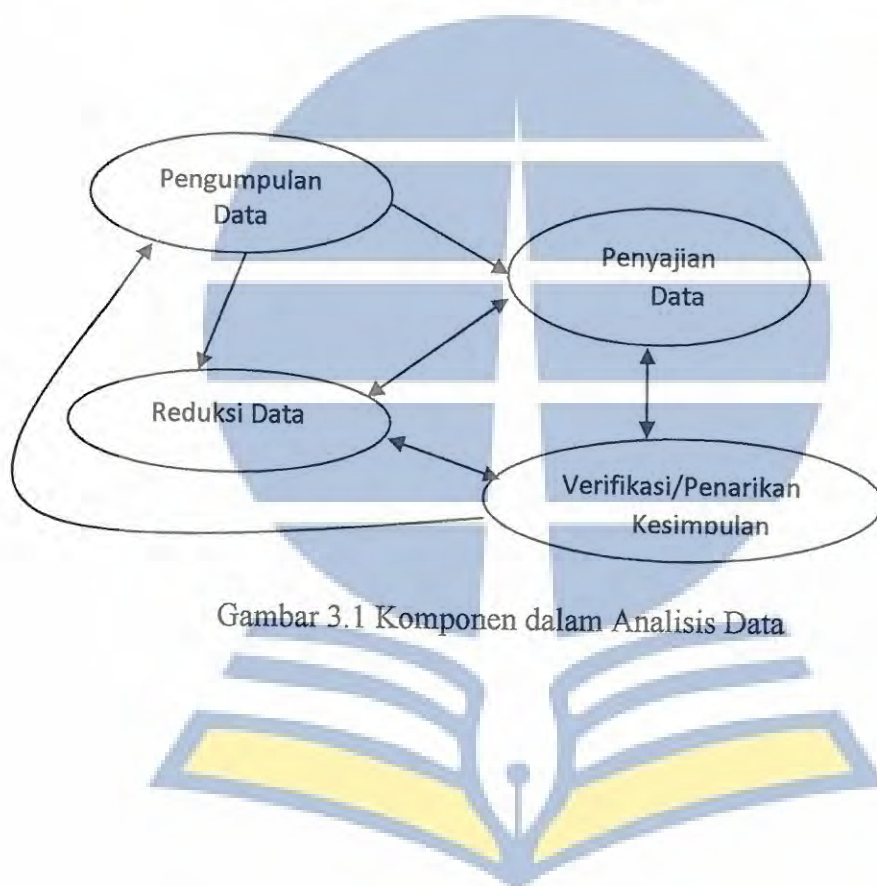
DAFTAR GAMBAR



Sumber: David C. Korten dalam (Tjokrowinoto, 1996)
Gambar 2.2 Persyaratan Kelayakan Program



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. DAFTAR KAMPUNG SASARAN DAN KONDISI SARANA

NO	NAMA KAMPUNG	KONDISI SARANA	
		BAIK	RUSAK
DISTRİK WARMARE			
1	IMBOISRATI		✓
2	NGUNGGUEN	✓	
3	DUWIN		✓
4	NIMBAY		✓
5	SNAIMBOY	✓	
6	UMCEN		✓
DISTRİK PRAFI			
7	BOGOR	✓	
8	PRAFI MULYA	✓	
9	KALI AMIN		✓
10	UHYEGBRIG		✓
11	SOMI		✓
DISTRİK SIDEY			
12	WOMNOWI		✓
13	MEYOF I		✓
14	WARUMUI		✓
15	WARIKI		✓
16	SIDEY MAKMUR	✓	
17	MANGGUPI		✓
18	SIDEY	✓	
DISTRİK MASNI			
19	YENSUM		✓
20	UNDI	✓	
21	JOWEN	✓	
22	KOYANI		✓
23	MEYERUK	✓	
24	BOWI SUBUR	✓	
25	ASKA	✓	
26	KALI MERAH	✓	
27	MEYOF II		✓
28	WAMFOURA	✓	
29	PRAFI BARAT	✓	
30	WARIORI	✓	
31	MANSABURI	✓	
32	MANTEDI	✓	
33	MUARA PRAFI	✓	
34	SIBUNI	✓	
35	YONSORIBO	✓	
36	MEIFORGA	✓	

37	MEREJEMEK		✓
DISTRIK MANOKWARI SELATAN			
38	MASYEPI	✓	
39	WARMOMI	✓	
40	WASAY	✓	
41	WELURI	✓	
42	MISAPMEYSI		
43	ANGGRESI	✓	
44	WARKOMI	✓	
45	WARSUAMI	✓	
46	ACEMO		✓
47	ANDAY	✓	
48	SOWI IV		✓
DISTRIK MANOKWARI TIMUR			
49	AROWI		✓
50	BAKARO		✓
51	AIPIRI		✓
52	SUSWENI	✓	
53	KWAWI		✓
DISTRIK MANOKWARI UTARA			
54	INODUAS	✓	
55	PAMI	✓	
56	SAIRO	✓	
57	BREMI	✓	
58	MENYUNFOKA	✓	
59	ASAI	✓	
60	MEYES	✓	
61	WARBEFOR	✓	
62	YONGGAM	✓	
DISTRIK TANAH RUBUH			
63	WARIARI	✓	
64	IMBESIKA I	✓	
65	CUYEHEP		✓
66	NINGDIP	✓	
67	WARMARWAI	✓	
68	IMHASUMA		✓
69	WARAMI	✓	

Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi

Tipe/Kriteria Evaluasi	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: (Dunn, Pengantar Analisa Kebijakan Publik, 2000)

Tabel 2.3 Model CIIP

Aspek Evaluasi	Tipe dari pengambilan keputusan	Jenis Pertanyaan
Context evaluation	Planning decisions	What should we do?
Input evaluation	Structuring decisions	How should we do it?
Process evaluation	Implementing decisions	Are we doing it as planned? And if not, why not?
Product evaluation	Recycling decisions	Did it work?

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Wawancara

No. ID:-----

WAWANCARA

Peneliti : _____
 Mahasiswa : _____
 Tgl. Wawancara : _____

Identitas Responden

Nama : _____ Tlp.Hp _____
 Unit Kerja : _____
 Alamat : _____
 Telepon : _____
 Umur : _____ Tahun
 Jenis Kelamin : Pria Wanita
 Status Pernikahan : Kawin Belum Kawin Pernah Kawin
 Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2 S3
 Pangkat dan Jabatan : _____
 Lama Menduduki Jabatan _____ tahun

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan berikut berkaitan dengan apa yang Bapak/Ibu pahami, alami dan rasakan tentang *“Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Manokwari”*

- 1) Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dalam program, misalnya penyediaan air minum dan sanitasi bagi kampung yang belum menerima?

- 2) Tujuan pengembangan apa yang belum tercapai oleh program, misalnya peningkatan kesehatan masyarakat karena adanya penyediaan air minum dan sanitasi?
- 3) Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, misalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan?
- 4) Tujuan-tujuan manakah yang paling mudah dicapai, misalnya pemerataan penyediaan air bersih dan sanitasi, ketepatan penyediaan air bersih dan sanitasi?
- 5) Apakah penyediaan air minum dan sanitasi berdampak jelas pada kesehatan masyarakat?
- 6) Berapa kampung yang menerima dengan senang hati penyediaan air minum dan sanitasi?
- 7) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kesehatan mereka setelah disediakan air minum dan sanitasi?
- 8) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
- 9) Apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
- 10) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- 11) Hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan hambatan jika program dilanjutkan?
- 12) Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
- 13) Dalam hal apakah berbagai kebutuhan masyarakat sudah dapat dipenuhi selama proses penyediaan air minum dan sanitasi?
- 14) Apakah dampak yang diperoleh masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program penyediaan air minum dan sanitasi ini?
- 15) Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?
- 16) Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
- 17) Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
- 18) Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu ?

- 19) Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
- 20) Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
- 21) Apakah ada kesesuaian antara kebutuhan masyarakat sebagai penerima program dan hasil-hasil dari pelaksanaan program ?
- 22) Apakah ada kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan organisasi dan pelaksanaan dalam mengelola organisasi ?
- 23) Apakah ada kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana ?



Lampiran 2: Daftar Kampung Sasaran

**DAFTAR KAMPUNG SASARAN YANG TELAH
DIFASILITASI PAMSIMAS KABUPATEN MANOKWARI**

NO	NAMA KAMPUNG	SASARAN PAMSIMAS	
		SUDAH	BELUM
DISTRIK WARMARE			
1	INDISEY		✓
2	MENIY		✓
3	AMBER		✓
4	INDOYBEY		✓
5	AIWOU		✓
6	DINDEY		✓
7	WARMARE		✓
8	IMBOISRATI	✓	
9	SUBSAY		✓
10	NGUNGGUEN	✓	
11	SOTEA		✓
12	TANAH MERAH		✓
13	MINGRE		✓
14	SRAINDABEY		✓
15	MADRAT		✓
16	DUWIN	✓	
17	HINK		✓
18	IBUWAU		✓
19	DUABEY		✓
20	ASARBAY		✓
21	NIMBAY	✓	
22	SNAIMBOY	✓	
23	KWAU		✓
24	GUENTUIY		✓
25	UMCEN	✓	
26	SYOU		✓
27	MINOUGBEY		✓
28	FIGOUD		✓
29	MOKWAM		✓
30	KIPUAU		✓
31	BAHAMYENTI		✓
DISTRIK PRAFI			
32	MATOA		✓
33	AIMASI		✓
34	BOGOR	✓	
35	PRAFI MULYA	✓	
36	KALI AMIN	✓	

37	KERENU		✓
38	LISMAUNGU		✓
39	DESAY		✓
40	UHYEGBRIG	✓	
41	INGKUISI		✓
42	MEBJI		✓
43	WASEGI INDAH		✓
44	UDAPI HILIR		✓
45	WASEKI POP		✓
46	SOMI	✓	
47	UMBUY		✓
DISTRIK SIDEY			
48	SIDEY JAYA		✓
49	SIDEY		✓
50	WOMNOWI	✓	
51	SARAY		✓
52	MEYOF I	✓	
53	WARUMUI	✓	
54	WARIKI	✓	
55	SIDEY MAKMUR	✓	
56	MANGGUPI	✓	
57	KASSI		✓
58	SIDEY	✓	
59	KAIRONI		✓
DISTRIK MASNI			
60	MASNI		✓
61	SUMBER BOGA		✓
62	YENSUM	✓	
63	UNDI	✓	
64	UREY		✓
65	JOWEN	✓	
66	KOYANI	✓	
67	MEYERUK	✓	
68	BOWI SUBUR	✓	
69	MEMBOWI		✓
70	ASKA	✓	
71	KALI MERAH	✓	
72	WARIORI INDAH		✓
73	MACUAN		✓
74	MEYOF II	✓	
75	SAMBAB		✓
76	IGOR		✓
77	WAMFOURA	✓	
78	PRAFI BARAT	✓	
79	MUARA WARIORI		✓
80	WARIORI	✓	
81	MANSABURI	✓	
82	MANTEDI	✓	

83	MUARA PRAFI	✓	
84	SIBUNI	✓	
85	RIRINFOS		✓
86	YONSORIBO	✓	
87	MEIFORGA	✓	
88	MAKWAM		✓
89	AURMIOS		✓
90	MOUBJA		✓
91	MEREJEMEK	✓	
DISTRIK MANOKWARI SELATAN			
92	MASYEPI	✓	
93	KATEBU		✓
94	DIHARA		✓
95	WARMOMI	✓	
96	WASAY	✓	
97	WELURI	✓	
98	WAMESA		✓
99	MARUNI		✓
100	DOBUT		✓
101	MISAPMEYSI		
102	ANGGRESI	✓	
103	MUPI		✓
104	WARKOMI	✓	
105	WARSUAMI	✓	
106	NGINIBOU		✓
107	ACEMO	✓	
108	ANDAY	✓	
109	SOWI IV	✓	
DISTRIK MANOKWARI TIMUR			
110	MANSINAM		✓
111	AROWI	✓	
112	AYAMBORI		✓
113	BAKARO	✓	
114	AIPIRI	✓	
115	SUSWENI	✓	
116	KWAWI	✓	
DISTRIK MANOKWARI BARAT			
117	INGGRAMUI		✓
118	UDOPI		✓
119	SORIBO		✓
120	TANAH MERAH INDAH		✓
DISTRIK MANOKWARI UTARA			
121	INODUAS	✓	
122	CABANG DUA		✓
123	PAMI	✓	
124	SAIRO	✓	
125	BREMI	✓	
126	MENYUNFOKA	✓	

127	YOOM I		✓
128	LEBAU		✓
129	SAUBEBA		✓
130	YOOM II		✓
131	TANA RUBUH		✓
132	ASAI	✓	
133	IDOU OUFA		✓
134	MUBRAIDIBA		✓
135	MANDOPI		✓
136	INYEI		✓
137	MUBRI		✓
138	TELUK MUBRI		✓
139	MEYES	✓	
140	INYA		✓
141	WARBEFOR	✓	
142	YONGGAM	✓	
DISTRIK TANAH RUBUH			
143	MISA BUGOID		✓
144	WARIARI	✓	
145	IMBESIKA I	✓	
146	IMBESIKA II		✓
147	CUYEHEP	✓	
148	NINGDIP	✓	
149	IMBOITI		✓
150	URWAMBEY		✓
151	MIROWI		✓
152	INDIBO		✓
153	UMNUM		✓
154	WARMARWAI	✓	
155	REMBUY		✓
156	MBATMA		✓
157	UKOPTI		✓
158	HANGHOU		✓
159	AYAMI		✓
160	IMHASUMA	✓	
161	WARAMI	✓	
162	WARNYETI	✓	
163	WEDONI		✓
164	WARKAPI		✓
165	UKEMBOISI		✓
166	MENYUMFOKU		✓

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

No. ID: 001

WAWANCARA

Peneliti : Agung Kurniawan
 Mahasiswa : Program Pascasarjana Program Studi Magister
 Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong
 Tgl. Wawancara : _____

Identitas Responden

Nama : SUDIRMAN
 Unit Kerja : PAMSIMAS KABUPATEN MANOKWARI
 Alamat : Jl. Drs. Esau Sesa Manokwari
 Telepon : 081247762929
 Umur : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Pria Wanita
 Status Pernikahan : Kawin ~~Belum Kawin~~ ~~Pernah Kawin~~
 Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2 S3
 Pangkat dan Jabatan : FM Pamsimas
 Lama Menduduki Jabatan : 3 tahun

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan berikut berkaitan dengan apa yang Bapak/Ibu pahami, alami dan rasakan tentang **“Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Manokwari”**

- 1) Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dalam program, misalnya penyediaan air minum dan sanitasi bagi kampung yang belum menerima?
“Secara umum terpenuhi, kecuali di saat musim kemarau sering air yang mengalir sangat kecil disebabkan debit air dari sumber air mengalami

penurunan volume”

- 2) Tujuan pengembangan apa yang belum tercapai oleh program, misalnya peningkatan kesehatan masyarakat karena adanya penyediaan air minum dan sanitasi?

“Dalam hal kesehatan masih sangat kurang, yang diajarkan fasilitator Pamsimas hanyalah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) selain itu tidak ada”

- 3) Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, misalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan?

“Perlunya peran aktif Dinas Kesehatan yang sebenarnya merupakan bagian dari Satker Pamsimas, namun perannya selama ini nihil”

- 4) Tujuan-tujuan manakah yang paling mudah dicapai, misalnya pemerataan penyediaan air minum dan sanitasi, ketepatan penyediaan air minum dan sanitasi?

“Pemerataan penyediaan air minum lebih mudah diwujudkan, namun pemeliharaan pasca serah terima kegiatan yang sangat sulit dilakukan masyarakat”

- 5) Apakah penyediaan air minum dan sanitasi berdampak jelas pada kesehatan masyarakat?

“Iya sangat berdampak, dari mudahnya akses masyarakat terhadap air minum membuat penggunaan air bersih lebih dominan terjadi, dibandingkan selama ini masyarakat kebanyakan menyimpan air pada tempat penyimpanan yang tidak sehat seperti pada drum air yang telah berkarat”

- 6) Berapa kampung yang menerima dengan senang hati penyediaan air minum dan sanitasi?

“Dari 70 kampung yang telah difasilitasi Pamsimas hanya 1 kampung yang menolak, disebabkan keinginan oknum masyarakat kampung yang ingin membangun sarana air minum Pamsimas secara pribadi dengan sistem proyek”

- 7) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kesehatan mereka setelah disediakan air minum dan sanitasi?

“Masyarakat merasa berterima kasih disebabkan penggunaan air yang mudah

dan langsung disambungkan kerumah mereka, sehingga penggunaan air untuk minum dan cuci lebih banyak dipakai dibandingkan sebelumnya yang mana penggunaan air harus sehemat mungkin sehingga kebersihan terabaikan demi penghematan air”

- 8) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
“Iya selama ini sesuai jadwal”
- 9) Apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
“Walaupun dengan jumlah fasilitator yang kurang namun Pamsimas Manokwari sanggup memfasilitasinya”
- 10) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
“Satahun dua tahun setelah serah terima sarana dan prasarana masih digunakan secara baik, namun setelah itu mulai mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki disebabkan sistem pemeliharaan jaringan yang buruk dari masyarakat kampung”
- 11) Hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan hambatan jika program dilanjutkan?
“Jumlah fasilitator yang masih kurang serta SDM fasilitator dan masyarakat yang juga terhitung masih rendah”
- 12) Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
“Secara pencapaian terget kampung per tahun yang harus difasilitasi tercapai, namun pemeliharaan jaringan pasca serah terima yang sangat menguatirkan”
- 13) Dalam hal apakah berbagai kebutuhan masyarakat sudah dapat dipenuhi selama proses penyediaan air minum dan sanitasi?
“Kebutuhan air yang langsung dapat digunakan dirumah-rumah”
- 14) Apakah dampak yang diperoleh masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program penyediaan air minum dan sanitasi ini?
Kebutuhan akan air terpenuhi”
- 15) Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?
“Secara jumlah telah tercapai, namun secara kualitas pemeliharaan belum

tercapai”

- 16) Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
“Harus ditambahnya jumlah fasilitator yang berkualitas agar dapat terus mendampingi masyarakat dalam proses pemeliharaan jaringan air yang telah terpasang”
- 17) Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
“Selama ini masalah pemeliharaan pasca serah terima fasilitas Pamsimas belum dapat ditanggulangi”
- 18) Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu ?
“Seluruh masyarakat kampung sasaran menerima fasilitas yang sama dari Pamsimas”
- 19) Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
“Tidak selalu, sebab penentuan kampung sasaran seringkali merupakan otoritaspemerintah, Pamsimas hanya tinggal memfasilitasi saja”
- 20) Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
“Iya benar-benar bernilai, sebab air merupakan suatu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar”
- 21) Apakah ada kesesuaian antara kebutuhan masyarakat sebagai penerima program dan hasil-hasil dari pelaksanaan program ?
“Sangat sesuai, sebab selama ini masyarakat mengalami kesulitan dalam penyediaan air minum”
- 22) Apakah ada kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan organisasi dan pelaksanaan dalam mengelola organisasi ?
“Dalam pelaksanaan sering ditemukan lompat tahapan, disebabkan SDM fasilitator dan juga SDM masyarakat yang masih rendah”
- 23) Apakah ada kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana ?
“Tidak selalu sesuai, sebab aturan organisasi sering kali tidak cocok diterapkan pada masyarakat di Kabupaten Manokwari, harus dibuat aturan khusus yang dapat lebih mudah diterapkan pada masyarakat Kabupaten Manokwari”.

Lampiran 4: Foto - foto Infrastruktur Yang Telah Dibangun Pamsimas Kabupaten Manokwari



Kran Umum Kampung Kwawi Tampak Samping



Kran Umum Kampung Kwawi Tampak Belakang



Sumur Gali Kampung Meyes



CTPS Kampung Sairo



Sarana CTPS Kampung Prafi Mulya



Murid TK Menggunakan Sarana CTPS